



KADIN NEWS

VOL. 2 | SEPTEMBER 2023



ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2023:

Presiden RI Joko Widodo
Buka ABIS 2023 di
Istana Merdeka

Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2023:

Kemenko Marves dan
Kadin Indonesia Gelar
Pertemuan Sustainability
dengan Pemimpin Dunia
dan Tokoh Bisnis



Perayaan HUT ke-55

Kadin Indonesia:

Adakan Fun Walk
dan Bazar UMKM

Advokasi Kebijakan:

Kadin Indonesia Aktif Beri
Masukan untuk Permendag
No. 31/2023

Kadin Indonesia
Rancang Buku Putih
RPP UU Kesehatan No. 17/2023
untuk Kemenkes

Roadmap Indonesia Emas 2045

Persembahkan Kadin bagi Indonesia
di HUT ke-55



Kemeriah HUT ke-55 Kadin Indonesia

di Seluruh Daerah

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

01	Sambutan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia	FGD/Seminar	03
67	Manfaat Keanggotaan Kadin	Program Pengurus	08
68	Cara Pendaftaran Anggota Kadin	Kegiatan Bersama dengan Kementerian/Lembaga/Asosiasi	22
69	Fitur Terbaru Website Kadin	Penandatanganan Nota Kesepahaman	38
70	Kabar Terkini: Indonesia Secara Resmi Larang Transaksi E-Commerce di Media Sosial	Kunjungan Internasional	39
75	Kabar Terkini: Kewajiban Pengguna Bursa Karbon Diperkenalkan: Ketidakpatuhan akan Dikenakan Sanksi	Special Section: ASEAN-BAC	50
78	Acara Mendatang	Special Section: ISF 2023	57
80	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin for Naker	Special Section: HUT Kadin Ke-55	60
81	Inisiatif Kadin Indonesia: Wiki Wirausaha	Liputan Khusus	63
82	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin Net Zero Hub	Pengumuman Penting	66
83	Inisiatif Kadin Indonesia: TRADE		

SAMBUTAN PELAKSANA TUGAS HARIAN KETUA UMUM

Kadin Indonesia



Roadmap Indonesia Emas 2045 merupakan persembahan Kadin kepada Bangsa Indonesia, yang diserahkan bertepatan juga dengan HUT Kadin Indonesia ke-55

**Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya,
Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua**

Bulan September telah kita lalui bersama dengan baik. Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat sehingga banyak kegiatan dan agenda penting Kadin Indonesia telah dapat terlaksana selama satu bulan yang lalu. Setelah penerbitan perdana pada bulan Agustus lalu, kita turut bersyukur karena *newsletter* Kadin Indonesia yang kami beri nama Kadin News, berhasil tersusun dalam Volume 2.

Salah satu agenda penting selama bulan September telah tergambar pada halaman awal Kadin News, yaitu penyerahan *roadmap* Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Joko Widodo di IKN. Roadmap Indonesia Emas 2045 merupakan persembahan Kadin kepada Bangsa Indonesia, yang diserahkan bertepatan juga dengan HUT Kadin Indonesia ke-55. Bulan September juga terasa sangat spesial karena Kadin Indonesia merayakan HUT ke-55 yang dibalut dalam rangkaian kegiatan acara *Fun Walk*. Antusiasme dari perayaan HUT Kadin Indonesia ini semakin menyulut semangat kita semua untuk terus mewujudkan komitmen sebagai induk organisasi dunia usaha dan wadah bagi pengusaha di Indonesia.

Melalui *newsletter* ini, kami juga telah merangkum seluruh agenda kegiatan dari Kadin Indonesia yang telah terlaksana selama bulan September. Semoga melalui *newsletter* yang Bapak/Ibu dan saudara/i baca saat ini, seluruh kerja keras dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kadin Indonesia dapat tersampaikan dengan baik untuk diketahui dan menjadi referensi demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

Akhir kata, mari kita dukung bersama program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kadin Indonesia.

Salam,

Yukki Nugrahawan Hanafi

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia

Sorotan Kegiatan **Bulan Ini**



FGD/SEMINAR



PROGRAM
PENGURUS



KEGIATAN BERSAMA
DENGAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA/ASOSIASI



PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN



KUNJUNGAN
INTERNASIONAL



SPECIAL SECTION:
ASEAN-BAC 2023



SPECIAL SECTION:
ISF 2023



SPECIAL SECTION:
HUT KADIN KE-55



LIPUTAN KHUSUS



PENGUMUMAN
PENTING

FGD/SEMINAR

Audiensi Bersama Direktorat Jenderal Pajak: Kontribusi Nyata Kadin Indonesia Terhadap Kebijakan Fiskal Indonesia

Pada tahun 2022, Presiden RI, Joko Widodo, meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini diambil mengingat semua negara sedang menghadapi tantangan global yang tidak mudah.

Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) tahun 2023 memproyeksikan bahwa perekonomian global akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tingkat 1,7 persen pada 2023. Bahkan, perlambatan akan terjadi hampir di semua negara, bahkan di negara-negara maju akan dialami 95 persen negara, sementara di negara atau pasar berkembang terjadi di 70 persen negara.

Diperlukan sinergi dari seluruh pihak untuk menghadapi tantangan tersebut. Sejalan dengan program pemerintah tersebut, Kadin Indonesia menginisiasi gerakan ini dengan tujuan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah, untuk bekerja sama dengan UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan akan menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan UMKM sebagai tulang punggungnya.

WKU Bidang Kebijakan Fiskal & Publik, Suryadi Sasmita didampingi Ketua Komite Tetap Perpajakan, Siddhi Widyapratama, bersama pengurus Bidang Kewirausahaan, pengurus Bidang Perhubungan, dan perwakilan dari Indonesian National Shipowners' Association (INSA) melakukan audiensi kepada Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN), Pande Putu Oka Kusumawardani, di Kantor BKF pada 1 September 2023. Pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya terkait Pajak UMKM untuk naik kelas dan isu perkapalan.

Dalam audiensi tersebut, disimpulkan bahwa konsep kemitraan *Inclusive Closed Loop* yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tahun 2022 merupakan upaya untuk mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan dan lebih mendalam dengan pelaku UMKM. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan PMK 128/2019 terkait kemitraan dengan UMKM, sehingga dibutuhkan perluasan atau penyempurnaan regulasi.

(lanjutan di halaman 4)





Begitu juga dalam isu terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kapal. PBB adalah kewajiban pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan. Aturan ini berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

Dalam audiensi tersebut, Kadin Indonesia mengajukan keberatan dengan alasan bahwa kapal tidak secara terus menerus melekat pada tanah, dan kasus-kasus di Pengadilan Pajak telah menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan PMK 186/2019. Hal ini mengindikasikan perlunya klarifikasi dan revisi dalam peraturan terkait PBB untuk objek kapal.

FGD/SEMINAR

Perkuat Literasi Ekonomi Syariah, Pengurus Badan Ekonomi Syariah Ambil Bagian dalam FGD

Meskipun menyandang status sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbanyak di dunia, namun literasi terhadap ekonomi dan keuangan syariah masih perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mencapai 23,3%. Data ini menunjukkan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat lewat berbagai bentuk kegiatan.

Melihat potensi yang ada, Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia mengikuti FGD terkait literasi Ekonomi Syariah yang diselenggarakan pada 8 September 2023 untuk membahas langkah strategis literasi dan inklusi keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Diwakili oleh Pengurus Badan Ekonomi Syariah, Iim Rusyamsi dan Susi A. Ray, FGD ini juga turut menyoroti beberapa poin kunci, yaitu mendorong RUU tentang ekonomi syariah, pelaksanaan edukasi literasi syariah melalui media massa, dan membangun jaringan internasional yang dapat terwujud melalui kesempatan menjadi narasumber. Keterlibatan Kadin Indonesia dalam FGD ini merupakan langkah konkret dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.



FGD/SEMINAR

Kadin Indonesia Proaktif Dukung Penyusunan Peta Jalan Industri Keamanan Siber Indonesia

Industri keamanan siber merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem keamanan siber nasional. Mengacu pada keterangan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), keamanan siber berperan dalam penyediaan produk dan layanan keamanan siber yang andal dan terjangkau, sehingga dapat membantu melindungi aset dan data digital dari ancaman serangan siber. Menurut laporan BSSN, Indonesia mengalami sekitar 3.000 serangan siber per hari selama tahun 2023, dimana jumlah ini terbilang meningkat dari tahun sebelumnya.



Dalam rangka membina industri keamanan siber nasional, diperlukan peta jalan yang komprehensif dan terintegrasi, BSSN tengah menyusun Peta Jalan Industri Keamanan Siber yang akan menjadi acuan bagi pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan industri keamanan siber nasional. Pemerintah melalui BSSN berusaha melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pelaku industri, maupun akademisi dalam penyusunan peta jalan ini.

Sadar akan perannya sebagai wadah para pelaku usaha di Indonesia, Kadin Indonesia melalui Bidang Kominfo mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendukung upaya BSSN dalam penyusunan peta jalan Industri Keamanan Siber di Indonesia. FGD dilaksanakan pada 11 September 2023 dengan mengangkat tema "Strengthening the Development of Indonesia's Cybersecurity Industry: The Role of Innovation and Governance".

Sejumlah 36 perwakilan Asosiasi dan Perusahaan Information and Communication of Technology (ICT) terkemuka, seperti Google Indonesia, CISCO, META, Telkom Indonesia, Microsoft Indonesia, AFPI, IdEA, dan IDCi hadir dalam FGD ini untuk fokus menyusun kerangka kerja antara pemerintah dan sektor swasta. Kerangka kerja ini akan berperan dalam membangun infrastruktur keamanan siber, mengembangkan talenta digital, dan meningkatkan tata kelola pengawasan serta penanganan insiden siber.



FGD/SEMINAR

Audiensi Kadin Indonesia dengan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO): Dorong Terciptanya Regulasi Rokok Elektronik

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengguna rokok elektrik (*vape*) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), jumlah pengguna rokok elektrik yang masuk dalam golongan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) ini telah mencapai 2,2 juta orang pada tahun 2022.

Peningkatan pengguna rokok elektrik juga berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah pelaku bisnis di sektor ini. Dikutip dari Medcom.id, Kepala Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mogadishu Djati Ertanto, mengatakan, tercatat terdapat 5.000 toko ritel yang menjual rokok elektronik.



Untuk menjamin aktivitas bisnis di sektor ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi, para pelaku bisnis memerlukan regulasi yang mengatur persaingan di antara toko ritel rokok elektronik. Situasi ini mendorong Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) mengunjungi Kadin Indonesia untuk melakukan audiensi pada 19 September 2023.



Sebagai wujud komitmen Kadin Indonesia sebagai wadah para pelaku usaha di tanah air, Kadin Indonesia, yang diwakili oleh WKU Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, bergabung pada audiensi bersama ARVINDO, yang diwakili oleh Dewan Pembina ARVINDO, Adi Sulisto. Pertemuan ini secara konstruktif menggalang masukan terkait penyusunan regulasi yang mengatur praktik bisnis rokok elektronik, terutama terkait penentuan harga jual produk tersebut di pasaran.

Kadin Indonesia menampung dan merumuskan aspirasi serta saran yang terkumpul dari pertemuan ini yang kemudian akan diberikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan perdagangan di sektor ini. Seluruh pihak berharap langkah ini dapat menjadi sarana untuk mencapai titik tengah yang baik dan mengakomodasi kepentingan pengusaha dengan pemerintah sehingga tercipta ekosistem bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan industri *vape* di Indonesia.

FGD/SEMINAR

Upaya Peningkatan Kapasitas Pekerja melalui Proyek Skill Development dan Responsible Business Conduct



Pengembangan keterampilan bagi para pekerja terbilang penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesempatan karir yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan kapasitas para pekerja, pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang (METI), mendanai perumusan Proyek Skill Development dan Responsible Business Conduct.

Proyek ini memiliki misi memberikan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya tanggap dan produktivitas pekerja, mempromosikan pelaksanaan bisnis, serta mempromosikan industri yang berkontribusi.



International Labour Organization (ILO) mengagendakan sebuah pertemuan dengan Kadin Indonesia untuk memperkenalkan proyek ini pada 19 September 2023. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Kadin Indonesia menyambut baik jalannya Proyek Skill Development dan Responsible Business Conduct.

WKU Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz Wuhadji dan Ketua Komite Tetap Pelatihan Vokasi, Wisnu Wibowo, menerima langsung audiensi dari ILO terkait proyek yang berlangsung pada April 2023 – Maret 2025 ini. Pada praktiknya, proyek ini menargetkan industri listrik dan elektronik, khususnya di Indonesia, Thailand, dan Jepang.

Merupakan sebuah harapan bersama bahwa proyek ini dapat menghasilkan peningkatan peluang kerja di industri melalui peningkatan *skill development*, dialog sosial, dan pemetaan *skill* yang dibutuhkan.



PROGRAM PENGURUS

Resmikan Embung, Kadin Indonesia Inisiasi Kolaborasi Petani dan Korporasi Guna Optimalkan Izin Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat

Di Pulau Jawa, kondisi tanah di hutan dan pertanian sering mengalami kekurangan sumber air yang krusial. Oleh karena itu, perlu ada tindakan yang mendukung penyediaan air. Presiden telah mengajak dunia usaha untuk turut serta dalam pengembangan perhutanan sosial di Indonesia dan berkomitmen untuk memberikan bantuan berupa 40 embung di wilayah Perhutanan Sosial.



Sebagai upaya dalam mendukung program perhutanan sosial yang dicanangkan pemerintah, Kadin Indonesia telah merancang suatu sistem kolaborasi antara Perhutanan Sosial dan dunia usaha. Tujuannya adalah memastikan bahwa izin yang diberikan oleh Presiden dapat menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.

Salah satu bentuk kolaborasi nyata dengan berbagai *stakeholders* relevan adalah membangun embung di lahan milik Hutan (KTH) Wono Makmur, Boyolali. Embung tersebut diresmikan pada 31 Agustus 2023 di Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

(lanjutan di halaman 9)

Peresmian Embung Boyolali ini dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, sejumlah pengurus Kadin Indonesia, serta 10.000 petani anggota Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan bahwa pembangunan embung ini merupakan *pilot project* kolaborasi masyarakat dan korporasi yang diharapkan bisa menginspirasi kolaborasi-kolaborasi antar swasta dan masyarakat di tempat lain, sehingga 5,3 juta hektar izin perhutanan sosial yang sudah diberikan pemerintah, benar-benar bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Kebudayaan embung ini merupakan optimalisasi pemanfaatan lahan berdasarkan kajian untuk memenuhi kebutuhan petani, dalam penyediaan air irigasi sawah dan perhutanan sosial. Dengan demikian, harapannya embung ini dapat meningkatkan produksi pertanian dan perhutanan di sekitar lokasi embung.

-Arsjad Rasjid



Embung Boyolali mulai dibangun sejak Maret 2023. Embung dengan kapasitas 10.517 m³ ini berada di lokasi yang cukup tinggi sehingga dapat mengalirkan air dengan memanfaatkan gravitasi bumi. Pembangunan embung dan Sentra Perhutanan Sosial (SPS) dengan pendekatan *regenerative forest business* ini, merupakan respon dari kondisi tanah kehutanan dan pertanian di sejumlah daerah di Jawa yang selama ini kekurangan sumber air.

CEO Indika Nature, Leonardus H. Sidharta, berharap kolaborasi ini mampu membawa perubahan ekonomi di sekitar wilayah Boyolali.



Hal ini sejalan dengan tujuan Indika Nature untuk memelihara hutan dan mengelola hasilnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menciptakan masa depan yang berkelanjutan melalui solusi berbasis alam.

-Leonardus H. Sidharta



Ketua Gema PS, Rozikin, mengapresiasi kerja sama dengan Kadin Indonesia ini, "Kolaborasi ini melengkapi upaya kami untuk memperoleh izin dari negara untuk memanfaatkan secara optimal embung untuk kesejahteraan petani. Dengan kehadiran kolaborasi bersama Kadin Indonesia, kami optimis program Presiden ini benar-benar akan mensejahterakan petani."

Pembangunan embung di atas tanah izin SK Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Makmur itu, merupakan tindak lanjut dari laporan Gema PS kepada Presiden RI, Joko Widodo, pada Januari 2023.

PROGRAM PENGURUS

Rakernas Bidang PUPR: Kolaborasi untuk Infrastruktur Hijau dan Tenaga Kerja Konstruksi

Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai pengusaha Indonesia, baik dari sektor pemerintahan, koperasi, maupun swasta, Kadin Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan terjalannya koordinasi dan kolaborasi yang efektif di antara Kadin di seluruh provinsi.



Salah satu upaya dalam mencapai hal tersebut adalah melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang PUPR. Pada 31 Agustus 2023 lalu, Rakernas ini diadakan di Hotel Tentrem Semarang dengan tema "Kolaborasi Kadin Indonesia dan Kadin Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi Guna Mewujudkan Infrastruktur Hijau dan Berkelanjutan." Rakernas ini dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk 25 pengurus bidang PUPR dari berbagai Kadin Provinsi.

(lanjutan di halaman 11)

Dalam pidato sambutan pembukaan Rakernas, Gubernur Ganjar, mengangkat isu penting mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, Ganjar juga membahas pentingnya pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa serta perluasan pembangunan ke daerah-daerah. Fokus utama pertemuan ini adalah mengenai kolaborasi antara Kadin Indonesia dan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing serta melibatkan tenaga kerja di sektor konstruksi. Gubernur Jawa Tengah ini juga menyoroti pentingnya pengembangan kota-kota baru dan peran penting BUMN dalam proses ini.

Dua isu penting yang akan menjadi titik berat diskusi dan akan dirumuskan menjadi program kerja dalam Rakernas ini adalah tenaga kerja di sektor konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan.



Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam Rakernas ini, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang PUPR & Infrastruktur, Insannul Kamil, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Pembinaan, Pelatihan, dan Sertifikasi Mandiri (P3SM) yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi profesi dan badan usaha di sektor konstruksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing tenaga kerja di sektor konstruksi dan meningkatkan kualitas badan usaha konstruksi di Indonesia.

Selama sidang pleno Rakernas, terdapat 13 rekomendasi yang dihasilkan sebagai program strategis dari Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur. Rekomendasi-rekomendasi ini adalah hasil dari usulan-usulan yang diajukan oleh Kadin Indonesia dan Kadin Daerah, yang akan menjadi landasan program kerja ke depan.



PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Bahas Narasi Tunggal Repopulasi Usaha Sapi Perah Peternak dan Hortikultura



Narasi Tunggal Repopulasi Usaha Sapi Perah Peternak UMKM Pasca Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan suatu infeksi virus yang sangat akut dan memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi pada hewan-hewan yang memiliki kuku berjumlah genap atau berkuku belah. Penyakit ini memiliki potensi untuk menyebar dengan sangat cepat di antara populasi hewan dan dapat mengakibatkan dampak ekonomi yang sangat merugikan, terutama pada sektor peternakan.

Setelah terjadinya wabah PMK, terjadi upaya repopulasi usaha sapi perah oleh peternak UMKM. Ini merupakan fase penting dalam rangka memulihkan dan mengembangkan kembali usaha peternakan sapi perah yang terdampak oleh wabah PMK.

Untuk membahas narasi tunggal mengenai Repopulasi Usaha Sapi Perah Peternak UMKM pasca wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada 6 September 2023, Ketua Komite Tetap Peternakan, Tri Hardiyanto, mengadakan sebuah rapat khusus yang membahas strategi untuk melakukan repopulasi usaha sapi perah oleh peternak UMKM setelah terjadinya wabah PMK. Rapat ini dilaksanakan melalui ekosistem *inclusive closed loop* dan dihadiri oleh 11 orang peserta, termasuk pengurus Komtap Peternakan, Asosiasi Pengolah Susu, dan PISAgro.

(lanjutan di halaman 13)

Pertemuan yang dilaksanakan melalui ekosistem *inclusive closed loop* model ini telah menghasilkan beberapa keputusan, seperti perlunya koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal pendanaan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), perlunya tindak lanjut dalam pendampingan kesehatan hewan akibat PMK oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, dan penyempurnaan peran industri pengolahan susu melalui skema *inclusive closed loop* untuk mendukung usaha repopulasi sapi perah.

Rapat ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh peternak UMKM pasca-wabah PMK dan untuk memastikan keberlanjutan usaha sapi perah dalam industri peternakan.



Narasi Tunggal Hortikultura

Di Indonesia, praktik hortikultura telah berkembang sejak sangat lama. Hortikultura merupakan cabang dari pertanian tanaman yang berhubungan dengan tanaman pekarangan. Umumnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias. Lebih spesifik, hortikultura berfokus pada penanaman tanaman buah (pomologi/frutikultura), tanaman bunga (florikultura), tanaman sayuran (olerikultura), tanaman obat (biofarmaka), dan taman (lansekap). Subsektor hortikultura merupakan komponen penting dalam pembangunan pertanian yang terus bertumbuh dan berkembang dari waktu.

Dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan pertanian di Indonesia, Komite Tetap Hortikultura telah mengadakan rapat secara daring terkait pembahasan Narasi Tunggal (NT) Hortikultura. Rapat yang dihadiri oleh 14 orang ini dihadiri langsung oleh Ketua Komite Tetap Hortikultura Karen Tambayong, pengurus Komtap Hortikultura, IPB, dan PISAgro. Pertemuan ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain tahap awal penulisan Narasi Tunggal Hortikultura untuk penulisan buah dan sayur serta rencana PISAgro yang akan membuat acuan format penulisan NT Hortikultura. Kumpulan NT Hortikultura ini akan disatukan dalam suatu *grand design* pembangunan subsektor hortikultura yang akan disusul dengan pembuatan *roadmap*.

PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Gandeng Lima Perusahaan Akselerator dan Inkubator, Perkuat Wirausaha Nasional

Jumlah wirausaha sosial di Indonesia tercatat terus meningkat. Menurut data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), jumlah wirausaha sosial di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 20.000. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 15.000 pada tahun 2022. Menurut data dari British Council, keberhasilan wirausaha sosial berpotensi memberikan kontribusi sekitar 1,91% terhadap PDB Indonesia.

(lanjutan di halaman 14)

Melalui model bisnis yang adaptif dan kolaboratif, tren wirausaha sosial di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menghasilkan dampak sosial secara terukur kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi Wirausaha Sosial yang tercantum dalam Perpres No. 2 Tahun 2022-2024 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Kadin Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha agar bisa naik kelas dan memperkuat ekosistem digital kewirausahaan di Indonesia. Komitmen tersebut terwujud melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dengan perusahaan akselerator dan inkubator, yaitu PLUS, Instellar, dan Kumpul.



MoU ini akan memberikan landasan untuk meningkatkan akses *database* kewirausahaan pada program Wiki Wirausaha, khususnya melalui penyediaan akses digital pada website WikiWirausaha Sosial. Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan Kadin Indonesia, Aldi Haryoprato, mengatakan MoU ini akan memperkuat ekosistem wirausaha sosial di Indonesia sekaligus menciptakan lebih banyak peluang mempromosikan kewirausahaan sosial kepada jaringan anggota Kadin Indonesia.

Turut hadir pula dalam agenda penandatanganan ini Ketua Komisi Tetap Wirausaha Sosial Kadin Indonesia, Dini Indrawati Septiani. Dini menyampaikan harapannya agar MoU ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan akselerator dan inkubator lainnya untuk berkolaborasi dengan program Wiki Wirausaha Sosial Kadin Indonesia. Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi lanjutan mengenai wirausaha sosial juga sedang dalam diskusi antara Kadin Indonesia dan kementerian-kementerian terkait. Oleh karena itu, penyediaan ekosistem yang baik menjadi salah satu prasyarat untuk memperkuat basis wirausaha sosial di Indonesia.

Dengan jaringan dunia usaha yang luas melalui Kadin Indonesia, laman *website* WikiWirausaha Sosial dapat menjadi pusat sumber informasi dan menghubungkan perusahaan besar untuk berkolaborasi dengan para wirausaha sosial dalam upaya memperluas dampak positif yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. *Website* tersebut dapat diakses melalui tautan <https://wikiwirausaha.id/wiki-wirausaha-sosial/>.



PROGRAM PENGURUS

Berperan Aktif dalam Implementasi UU Kesehatan No. 17/2023, Kadin Indonesia Serahkan White Paper kepada Kementerian Kesehatan



Undang-Undang (UU) Kesehatan No. 17/2023 yang disahkan pada 11 Juli 2023 melalui Rapat Paripurna DPR RI memiliki perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu UU No. 36/2009. UU Kesehatan No. 17/2023 dianggap memiliki cakupan yang lebih umum daripada UU No. 36/2009 sebelumnya yang lebih spesifik.

Pergeseran menuju pendekatan yang lebih umum ini sebenarnya sangat penting karena memberikan fleksibilitas kepada negara yang mencakup perubahan pada layanan kesehatan, peningkatan jumlah produksi obat dan peralatan medis, serta upaya mendatangkan investasi dalam sektor kesehatan.

Tanpa fleksibilitas ini, akan sulit bagi negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada jumlah penduduk yang terus berkembang, terutama dengan keterbatasan sumber daya keuangan dan tenaga kesehatan. Ditambah lagi, Indonesia juga harus mengantisipasi situasi seperti pandemi Covid-19, di mana akses terhadap obat-obatan, peralatan medis, dan layanan kesehatan dari jarak jauh menjadi sangat krusial.

Meskipun demikian, penting untuk tetap mempertahankan aturan dan kebijakan khusus dalam bidang farmasi dan peralatan medis untuk memastikan keamanan, kualitas, kemanfaatan, dan ketersediaan produk-produk tersebut. Di sisi lain, seluruh pihak juga harus memastikan bahwa kita mengikuti panduan global dan regional dengan benar sehingga tidak mengancam industri farmasi dan peralatan medis dalam negeri. Hal ini sangat relevan dengan UU No. 17/2023 yang telah menetapkan prioritas untuk penggunaan produk dalam negeri.

Oleh karena itu, pelaku usaha dalam sektor farmasi dan peralatan medis harus berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan yang sedang dibuat.

Kadin Indonesia, sebagai payung organisasi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah, telah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan masukan dari para anggota yang bergerak dalam sektor terkait.

(lanjutan di halaman 16)

Kadin Indonesia Bidang Kesehatan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan asosiasi-asosiasi seperti Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) Indonesia, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) untuk mengumpulkan masukan. Hasil dari diskusi ini telah dirangkum menjadi rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



1 Pembahasan masalah-masalah khusus yang akan memengaruhi ketersediaan farmasi dan peralatan medis serta industri sebagai akibat dari UU No. 17/2023.

2 Memberikan masukan tentang peraturan dan kebijakan yang harus dicantumkan secara spesifik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sektor farmasi dan peralatan medis.

3 Mengidentifikasi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang risiko-risiko yang perlu diidentifikasi dan dikelola dalam rantai pasok farmasi dan peralatan medis, sehingga masukan ini dapat dipertimbangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang sedang disusun.

Sebagai hasil dari berbagai rekomendasi yang terkumpul, Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Pengurus Bidang Kesehatan Kadin Indonesia telah berhasil menyusun buku putih (white paper) berisi uraian masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Kesehatan No. 17/2023 yang berkaitan dengan sektor farmasi dan alat kesehatan.

Pada 29 September 2023, buku putih ini diserahkan oleh WKU Bidang Kesehatan, Charles Honoris, kepada Kementerian Kesehatan, yang diwakili oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Lucia Rizka Andalucia, di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta. Buku putih ini merupakan wujud komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan di Indonesia melalui kerja sama aktif dengan pemerintah.



PROGRAM PENGURUS

Tanggap Bencana Alam di Maroko dan Libya, Kadin Indonesia Ulurkan Bantuan

Bencana alam adalah suatu ujian ketangguhan manusia dan negara. Dalam menanggapi bencana alam, Kadin Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan negara-negara sahabat dalam situasi darurat. Libya dan Maroko adalah dua negara di Afrika Utara yang belum lama ini dilanda bencana alam yang dahsyat hingga menewaskan jutaan orang.

Gempa Bumi di Maroko

Pada 9 September 2023, Maroko dilanda gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 6,9 yang menelan korban jiwa sebanyak 2.946 jiwa serta dan melukai lebih dari 5.600 orang, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Maroko.

Bencana ini merusak bangunan-bangunan dari desa-desa hingga kota-kota di Pegunungan Atlas hingga Marrakesh. Menurut data yang diumumkan dalam rapat gabungan komite keuangan Majelis Tinggi dan DPR di Parlemen Maroko, sebanyak 2.930 desa dengan populasi lebih dari 2,8 juta jiwa terkena dampak bencana gempa. Sementara jumlah bangunan yang runtuh mencapai 59.647 unit, dengan 32 persen di antaranya hancur total.



Banjir Bandang di Libya

Sementara itu, di Libya, banjir bandang menerobos dua bendungan sungai di hulu kota pada 10 September 2023. Banjir ini meluluhlantakkan sekitarnya dan menyapu ribuan orang ke Laut Mediterania. Jumlah korban tewas akibat bencana banjir di kota Derna, Libya Timur, telah meningkat menjadi 11.300 orang dan sebanyak 10.100 orang lainnya masih hilang di kota yang hancur tersebut. Hal ini terungkap dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bukan hanya Derna, banjir juga merenggut nyawa 170 korban di kota lain. Angka-angka ini diperkirakan akan meningkat karena kru pencarian dan penyelamatan masih terus bekerja.

(lanjutan di halaman 18)

Langkah Tanggap Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia

WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana (SPB), Yani Motik, bersama dengan Komite Bilateral Maroko dan Komite Bilateral Libya bergerak cepat dalam mengorganisir rapat strategis pada 14 September 2023 di Menara Kadin Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan rencana tanggap darurat dan upaya bantuan bagi kedua negara yang terkena dampak bencana tersebut.

Selain itu, Bidang SPB Kadin Indonesia juga mengambil inisiatif dengan rencana pendirian sebuah yayasan yang akan secara khusus berfokus pada masalah sosial dan kebencanaan. Yayasan ini diharapkan akan memudahkan penanganan permasalahan sosial yang mungkin timbul akibat bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang.

Tak hanya itu, Kadin Indonesia juga berkomitmen untuk menggalang dana melalui gerakan kemanusiaan *fundraising*, yang akan mengajak anggota Kadin Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan bantuan finansial yang sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi di kedua negara tersebut.

Kadin Indonesia percaya bahwa solidaritas dan kerja sama internasional sangat penting dalam mengatasi dampak bencana alam, dan komitmen ini mencerminkan tekad untuk berdiri bersama dalam krisis dan membantu negara-negara sahabat dalam masa-masa sulit.

PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Mengoptimalkan Potensi Energi Baru Terbarukan di Gorontalo

Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang Energi Baru Terbarukan (EBT). Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mengungkapkan kontribusi EBT dalam Bauran Energi Daerah pada tahun 2022. Provinsi Gorontalo mencapai 18,77%. Angka tersebut melampaui rata-rata kontribusi EBT dalam Bauran Energi Nasional yang berkisar antara 11% hingga 12%.

Melihat tingginya potensi sumber EBT di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia mengambil langkah proaktif dengan menjajaki peluang sinergi dan kerja sama dengan Kadin Provinsi Gorontalo dalam Rapat Persiapan Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Kadin Indonesia. Fokus utama kerja sama ini adalah mengidentifikasi serta mengembangkan potensi industri EBT di Provinsi Gorontalo.

(lanjutan di halaman 19)

Untuk memulai dialog dan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai potensi EBT di Gorontalo, Bidang ESDM Kadin Indonesia menginisiasi sebuah pertemuan awal yang digelar secara daring pada tanggal 20 September 2023. Pertemuan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan penting, termasuk Ketua Komite Tetap Industri Penunjang Rois Sunandar, Ketua Komite Tetap Kelistrikan Arthur Simatupang, serta Wakil Komite Tetap Minerba Damoza Nirwan, yang mewakili Kadin Indonesia Bidang ESDM. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Investasi Kadin Provinsi Gorontalo, Yasin Muhammad, beserta tim dari Kantor Wilayah ESDM Provinsi Gorontalo.

Kerja sama antara Kadin Indonesia Bidang ESDM dan Kadin Provinsi Gorontalo ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong pengembangan sektor energi baru dan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi investasi dan pengembangan daerah.

PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Susun Peta Jalan Hilirisasi Batu Bara untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Proyek hilirisasi batu bara di Indonesia sempat mengalami hambatan signifikan ketika konsorsium yang terlibat mundur dari proyek ini di Sumatera Selatan. Proyek ini masih menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo, karena dapat mengurangi ketergantungan impor gas dari luar negeri.

Hingga saat ini, nasib proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) ini masih belum pasti, apakah akan tetap dilanjutkan atau tidak. Kabar terbaru dilansir dari CNBCIndonesia.com, (29/09/2023), menyebutkan bahwa pengembangan proyek ini sedang dalam proses mencari konsorsium baru yang akan mengambil alih.

Untuk mendorong terlaksananya hilirisasi batu bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberikan berbagai insentif. Menurut Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Suswanto, pemerintah telah merancang tiga insentif untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang berkomitmen dalam proses hilirisasi batu bara.

Tiga insentif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Pengurangan tarif royalti batu bara khusus untuk gasifikasi batu bara hingga 0%.
- 2 Pengaturan harga batu bara khusus untuk meningkatkan nilai tambah melalui gasifikasi yang dilaksanakan di mulut tambang.
- 3 Pemberian masa berlaku Izin Usaha Pertambangan batu bara yang dikhususkan pada batu bara untuk gasifikasi sesuai dengan umur ekonomis industri gasifikasi batu bara.

Rencana Produksi dan Ketahanan Cadangan Batu Bara Indonesia



(lanjutan di halaman 20)

Dalam rangka mendukung penyusunan Roadmap Hilirisasi Minerba, Sekretariat Kadin Indonesia (SKI) telah menyiapkan panduan awal dan kerangka kerja roadmap yang akan menjadi dasar bagi diskusi yang akan dipimpin oleh Direktur Program SKI, Harsono. Diskusi tersebut juga melibatkan Ketua Komunitas Tata Kelola Pertambangan (Komtap Minerba) serta Sekretaris Pokja Hilirisasi Minerba, Rizqi Dharsono dan Wakil Ketua Komtap Minerba serta anggota Pokja Hilirisasi Minerba, Umar R. Pulukadang. Diskusi ini berlangsung secara daring pada 19 September 2023 dengan tujuan memberikan gambaran utuh mengenai Roadmap Hilirisasi Minerba dan hasil yang diharapkan dari proses ini, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk disampaikan kepada pemerintah.

Hilirisasi batu bara adalah strategi penting dalam pemanfaatan batu bara dengan nilai tambah, sejalan dengan program Presiden RI, Joko Widodo, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

PROGRAM PENGURUS

Rakorwil Sulawesi Tekankan Pentingnya Sinergitas dan Kolaborasi

Representasi Kadin yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memainkan peranan penting dalam mengarahkan perekonomian daerah maupun nasional. Sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian, Kadin Indonesia mengemban visi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di seluruh daerah di Indonesia. Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci tercapainya tujuan bersama.



Demi memperkuat sinergi yang ada, Kadin Indonesia secara resmi mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi tahun 2023 pada 26 September 2023 di Gedung GPCC dan Hotel Grand Q, Gorontalo. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebagai urutan wilayah yang menduduki ketiga investasi terbesar di Indonesia, ekonomi Sulawesi di kuartal kedua tahun 2023 telah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,1 persen.

Rekam jejak yang baik ini dilihat sebagai peluang potensial untuk memperkenalkan sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi demi menggenjot pertumbuhan dan investasi di wilayah tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, membuka Rakorwil tersebut yang turut menghadirkan Gubernur Provinsi Gorontalo Ismail Pakaya, Sekretaris Menteri Investasi/BKPM Ikmal Lukman, WKU Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi, WKU Wilayah Sulawesi Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Kadin Provinsi Gorontalo Muhalim Litty, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo, dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta.

(lanjutan di halaman 21)

Arsjad menegaskan, pelaksanaan Rakorwil ini merupakan wujud penguatan sinergitas Kadin Indonesia untuk menghasilkan langkah nyata yang meningkatkan investasi daerah. "Kadin Indonesia menilai wilayah Sulawesi dapat menopang ekonomi nasional dengan berbagai investasi yang ditawarkan berupa kekayaan alam, sumber mineral dan pertanian yang subur", pungkas Arsjad.

Senada dengan harapan Arsjad, Muhalim Litty juga berharap segala potensi sumber daya alam yang ada di Sulawesi, khususnya Gorontalo dapat semakin diketahui oleh para pengusaha. Masih dalam momen yang sama, pasca Rakorwil, terdapat agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengembangan Kawasan Hilirisasi Produk Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru. WKU Bidang Kelautan dan Perikanan, Joseph Pangalila dan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo menandatangani langsung perjanjian yang berfokus pada penguatan produk kelautan dan perikanan ini.



PROGRAM PENGURUS

Rapat Pengurus Harian Kadin: Wujud Transparansi Komunikasi kepada Anggota

Komunikasi dua arah yang transparan dalam sebuah institusi menjadi dasar yang kuat untuk menunjang berjalannya aktivitas dalam organisasi. Sebagai organisasi yang mewadahi para pelaku usaha di Indonesia, Kadin Indonesia berkomitmen untuk memiliki kepengurusan yang sinergis dan tangguh secara internal agar mampu membantu para anggotanya.

Dalam upaya untuk membangun transparansi dan komunikasi dua arah dengan anggotanya, Bidang Organisasi telah menyelenggarakan rapat pengurus harian Kadin Indonesia pada 25 September 2023. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, hadir secara langsung dan membuka rapat tersebut. Sejumlah 34 Wakil Ketua Umum dan Kepala Badan secara lengkap juga hadir dalam rapat yang berlangsung di Gedung Graha Mitra, Jakarta.

(lanjutan di halaman 22)



Salah satu hasil yang paling signifikan yang disimpulkan dari rapat ini adalah pengesahan sejumlah 23 Peraturan Organisasi (PO) oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Pengesahan ini merupakan langkah besar dalam mengatur kerangka kerja organisasi yang akan membentuk landasan operasional Kadin Indonesia dalam waktu ke depan.



Sebagai tindak lanjut, peraturan yang telah sah tersebut akan disosialisasikan ke Kadin Indonesia di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memastikan seluruh bagian dari Kadin Indonesia memiliki pemahaman yang seragam terkait diberlakukannya peraturan ini. Pengesahan dan sosialisasi PO ini mencerminkan komitmen Kadin Indonesia untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan organisasi, yang pada gilirannya diharapkan akan membantu Kadin Indonesia dalam memainkan peran yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi nasional serta mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Kadin Indonesia Terima Penghargaan Directorate General Tax (DGT) Awards

Sebagai wujud apresiasi terhadap konsistensi dukungan para pemangku kepentingan terhadap Reformasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penghargaan bertajuk "*Directorate General of Taxes (DGT) Awards*". Penghargaan ini diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan eksternal yang dirangkum dalam beberapa kategori, seperti Lembaga Donor Internasional, *Tax Center*, Media Massa, dan Instansi Pemerintah dan Asosiasi.

(lanjutan di halaman 23)

Berkaitan dengan penyelenggaraan penghargaan ini, Kadin Indonesia secara resmi menerima penghargaan Directorate General Tax (DGT) Awards dalam kategori instansi pemerintah dan asosiasi. Kadin Indonesia menerima langsung apresiasi ini sebagai organisasi yang berkontribusi dalam mendukung Reformasi Perpajakan di Indonesia. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita, didampingi oleh Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Chandra Wahjudi, dan Ketua Komite Tetap Kebijakan Fiskal Ita Mariza, menerima langsung penghargaan tersebut pada 25 September 2023 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.



Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi Kadin Indonesia untuk terus mewujudkan komitmen sebagai wadah utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Bersamaan dengan dilaksanakannya agenda pemberian penghargaan tersebut, DJP juga turut melaksanakan sarasehan dan *update* reformasi perpajakan, meluncurkan layanan perpajakan (Situs Web Edukasi, Renjani, Chatbot UMKM dan Chatbot Umum), serta mensosialisasikan informasi terkini terkait reformasi perpajakan.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Perlu Ditinjau Ulang: Bidang ESDM Kadin Indonesia Adakan Diskusi terkait Rencana Kenaikan Harga Gas Industri

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berencana menaikkan harga gas bumi untuk industri mulai 1 Oktober 2023. Rencana kenaikan ini diikuti alasan dari pihak PGN bahwa kenaikan harga gas ini diperlukan untuk mewujudkan keberlangsungan peran aktif PGN dalam penyediaan pasokan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional. Secara lebih detail, terdapat sejumlah kenaikan harga gas berdasarkan kategori, seperti pelanggan Gold dipatok menjadi US\$ 11,89 per MMBTU dari yang sebelumnya US\$ 9,16 per MMBTU. Pelanggan Silver dipatok US\$ 11,99 per MMBTU, sebelumnya hanya US\$ 9,78 per MMBTU. Pelanggan Bronze 3 dipatok sebesar US\$ 12,31 per MMBTU dari sebelumnya US\$ 9,16 per MMBTU.

Keterangan dari PGN menyebutkan, penyesuaian tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91/KMG/01/MEM/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan Ketentuan Harga Gas Bumi Tertentu yang berlaku. Rencana ini menuai reaksi penolakan, yang salah satunya disampaikan oleh Kementerian Perindustrian. Dikutip dari CNBC Indonesia, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Ignatius Warsito, menegaskan pihaknya akan mengawal agar kenaikan harga tersebut batal dilakukan.

(lanjutan di halaman 24)

Kadin Indonesia turut mengambil inisiatif terkait isu ini. Bidang ESDM Kadin Indonesia menginisiasi diskusi dengan asosiasi pengusaha di sektor migas yaitu Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia (APCNGI) dan Indonesian Petroleum Association (IPA) untuk membahas lebih jauh terkait rencana kenaikan harga gas industri yang akan dilakukan oleh PGN. Sebagai wadah bagi pengusaha di Indonesia, Kadin Indonesia senantiasa menghimpun aspirasi dari para pelaku bisnis demi terciptanya peraturan pemerintah yang tepat sasaran dan relevan. Dalam agenda tersebut secara spesifik turut dibahas mengenai rencana kenaikan harga gas industri bagi pelanggan Gold, Silver, dan Bronze sebelum resmi diberlakukan pada 1 Oktober 2023.

Bidang ESDM menyadari adanya kenaikan biaya produksi gas di lapangan sehingga besar harapan akan adanya solusi terbaik terkait rencana perubahan harga ini dengan tetap memprioritaskan harga keekonomian bagi investor.

Kadin Indonesia Adakan Diskusi ALB Bahas Kenaikan Harga Gas Industri

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berencana menaikkan harga gas bumi untuk industri per 1 Oktober 2023. Rencana kenaikan ini didorong dalih mewujudkan keberlangsungan peran aktif PGN dalam penyediaan pasokan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional. Menurut keterangan dari PGN, memang terdapat beberapa faktor yang membuat PGN berniat melakukan penyesuaian harga, seperti faktor sumber pasokan (Gas Pipa, LNG, CNG), harga pasokan, hingga kontribusi volume masing-masing pasokan gas.



Merespons rencana ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka suara dengan secara tegas menolak rencana kenaikan harga tersebut. Walaupun merupakan hal yang sah bagi PGN untuk mengumumkan rencana kenaikan harga gas industri namun, pemerintah memiliki kebijakan lain untuk tetap tidak menaikkan harga gas. Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pemerintah tetap menginginkan harga gas yang tetap ekonomis untuk pelanggan industri, mengingat telah ditetapkannya alokasi gas yang ditujukan bagi sektor industri.



Peka terhadap situasi yang berlangsung, Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia menginisiasi diskusi yang menghadirkan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia pada 7 September 2023. Pertemuan yang dilakukan secara *hybrid* tersebut fokus membahas mengenai rencana kenaikan harga gas industri oleh PGN.

Peka terhadap situasi yang berlangsung, Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia menginisiasi diskusi yang menghadirkan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia pada 7 September 2023. Pertemuan yang dilakukan secara *hybrid* tersebut fokus membahas mengenai rencana kenaikan harga gas industri oleh PGN.

Diskusi ALB tersebut telah berhasil menarik beberapa kesimpulan kesepakatan yang meliputi, asosiasi yang menolak kenaikan harga gas oleh PGN dengan dasar hukum Perpres 121/2020 dan aturan pelaksanaannya pada Kepmen ESDM 91.K/2023, usulan agar penetapan volume dan harga gas dilakukan oleh Kementerian ESDM, alih-alih oleh PGN, memastikan penetapan volume dan harga gas bumi kedepannya berdasarkan regulasi yang baru sebagai pengganti dari Perpres 121/2020, dan harapan asosiasi kepada Kadin Indonesia untuk dapat menyampaikan surat kepada Menko Perekonomian dan Menteri ESDM agar memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan PGN.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Dorong Indonesia Kuasai Pasar Halal Dunia, Kadin Ambil Bagian dalam The 7th Annual Islamic Finance Conference

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, ekonomi halal di Indonesia merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan sekitar 230 juta penduduk Muslim. Menurut keterangan dari Kementerian Keuangan menyebutkan, pada tahun 2022, ekonomi halal dapat meningkatkan PDB Indonesia sebesar USD 5,1 miliar per tahun melalui ekspor dan peluang investasi. Di sisi lain, Bank Indonesia memprediksi sektor prioritas *Halal Value Chain* (HVC) di dalam negeri, yaitu pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim akan tumbuh sebesar 4,5 – 5,3% pada tahun 2023, yang diproyeksikan mampu menopang lebih dari 25% ekonomi nasional.

Melihat adanya potensi ini, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyelenggarakan Konferensi Keuangan Islam Tahunan ke-7 (7th Annual Islamic Finance Conference/AIFC ke-7) tahun 2023 yang mengangkat tema “Peran Keuangan Islam untuk Mengatasi Ketidakpastian Global melalui Ekonomi Halal dan Reformasi Struktural yang Berkelanjutan dan Inklusif”. Konferensi ini dirancang untuk membahas dan mengatasi sejumlah isu utama yang terkait dengan ekonomi dan keuangan halal, seperti pengembangan ekosistem halal yang kuat, penguatan industri halal, dan penyaluran pembiayaan halal dalam mendukung pengembangan ekonomi halal.

Melihat Potensi Indonesia Kuasai Pasar Halal Dunia

Gelaran AIFC ke-7 merupakan acara tahunan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, seperti pengambil kebijakan, profesional, ekonom, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas berbagai isu utama keuangan Islam, ekonomi dan pembangunan, di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kadin Indonesia turut ambil bagian dalam konferensi yang dilaksanakan secara hybrid pada 28 Agustus - 1 September 2023.

(lanjutan di halaman 26)

Diwakili oleh Wakil Kepala Badan Bidang Keuangan, Jasa Keuangan, dan Dana Sosial bagian Perbankan Syariah, Banjarian Surya Indrastomo, Kadin Indonesia menekankan pentingnya penerapan teori, model, bidang bisnis Islam dan instrumen keuangan Islam untuk mengembangkan ekonomi halal dan mencapai hasil yang diharapkan.



Konferensi tersebut secara umum juga bertujuan untuk membahas perkembangan industri halal global dan Indonesia dari entitas internasional. Masih terkait dengan perhelatan KTT Asean, topik yang diusung pada konferensi ini juga masih terkait dengan tema ASEAN, yaitu "The Epicentrum of Growth", salah satunya terkait data dari Sekretariat Nasional Asean-Indonesia yang mencatat potensi besar Singapura untuk menjadi salah satu pasar produk halal dari Indonesia.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Kadin Indonesia Terlibat dalam Konsultasi Publik terkait Permenkeu tentang Pemotongan Pajak Penghasilan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan ini secara lengkap terangkum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.

Secara substansi, peraturan ini akan mengatur didalamnya terkait Pemotongan PPh Pasal 21, Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21, Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21, hingga Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Dalam rangka menunjang penyusunan rancangan peraturan tersebut, Kadin Indonesia turut terlibat dalam konsultasi publik atas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Konsultasi publik tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia, Johannes Ray dan perwakilan asosiasi bisnis terkait pada 7 September 2023.

Konsultasi publik yang berlangsung di Aula CBB Utama Gedung Marie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini bertujuan untuk menggalang tanggapan, masukan, dan usulan yang relevan dari asosiasi-asosiasi atau pihak-pihak terkait yang menunjang perumusan Peraturan Menteri ini agar lebih tepat sasaran dan mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Hal ini tercermin dari munculnya beberapa hal untuk ditindaklanjuti, yaitu:

(lanjutan di halaman 27)

- Perubahan mekanisme perhitungan PPh 21 dengan kalkulasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) berbasis pada aplikasi DJP
- Perlunya NIK pada aplikasi e-Bupot untuk membuat bukti pemotongan membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26
- Aplikasi untuk membuat bukti pemotongan membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 (e-Bupot) PPh 21 yang diperkirakan akan memerlukan NIK sebagai sarana pelaporan wajib, dengan risiko Pemotong tidak dapat melaporkan objek pajaknya jika tanpa keterangan NIK
- Aplikasi e-Bupot akan menghasilkan e-Bupot yang akan diprepopulasikan ke akun wajib pajak masing-masing Tax Account Management (TAM)
- Penetapan tarif TER diharapkan dapat mengurangi kerumitan perhitungan PPh 21 di masa pajak berjalan tanpa perubahan ketentuan UU di akhir tahun

Melalui konsultasi publik ini, akan semakin terbangun langkah nyata untuk memperbarui aturan-aturan terkait pajak penghasilan individu terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang lebih relevan.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Gandeng INKOWAPI dan Sahara, Kadin Indonesia Wujudkan Posko Pangan untuk Masyarakat

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5 persen dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sebagai wadah para pengusaha di Indonesia, Kadin Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam memperluas dan melebarkan peranan aktif UMKM, tidak terkecuali sektor pangan di tengah masyarakat.

Kadin Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengembangkan UMKM untuk berkontribusi pada perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Semangat ekonomi kerakyatan dan kegotongroyongan mendorong Kadin Indonesia bersama Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI) dan Sahabat Usaha Rakyat (Sahara) meresmikan Posko Pangan Serentak Nasional, yang juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(lanjutan di halaman 28)



Posko pangan ini merupakan kumpulan hadirnya warung-warung yang bertransformasi menjadi posko pangan dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Hadirnya posko pangan ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan 100 ribu warung yang terlibat.

Kadin Indonesia secara resmi meluncurkan program Posko Pangan Serentak Nasional pada 8 September 2023. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan, hadirnya posko pangan ini merupakan upaya nyata dalam menekan kemiskinan dengan cara memberikan harga pangan yang terjangkau.

Peresmian ini turut dihadiri pula oleh Walikota Jakarta Selatan Munjirin, Ketua Umum Inkowapi sekaligus Ketua Komite Tetap Koperasi Kadin Indonesia Sharmila Yahya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko RI Iskandar Simorangkir, dan perwakilan dari UMKM warung seluruh Indonesia.

Sharmila mengatakan bahwa hadirnya posko pangan ini merupakan langkah konkret kewirausahaan untuk mensinergikan sektor pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pasokan di tingkat RT/RW, pedesaan, kelurahan hingga kecamatan di seluruh daerah. Merupakan sebuah harapan bersama bahwa posko pangan ini akan membantu akses masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok yang mudah dan terjangkau.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Siap Dorong Kemajuan Sektor Olahraga, Kadin Indonesia Selenggarakan Diskusi Panel dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Sektor olahraga memegang andil penting yang turut berpengaruh terhadap berbagai aspek, tidak terkecuali aspek pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, peran sektor olahraga di Indonesia semakin menunjukkan grafik peningkatan positif. Sektor olahraga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2023, industri olahraga di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 73 triliun, meningkat 10% dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan prestasi olahraga Indonesia di ajang internasional, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga, hingga Pengembangan industri olahraga, seperti olahraga rekreasi, olahraga pariwisata, dan olahraga elektronik (*electronic sports/e-sports*). Jeli melihat potensi yang ada, Kadin Indonesia memiliki tujuan ke depan untuk menjadikan sektor olahraga sebagai salah satu kekuatan pembangunan yang turut menunjang peningkatan produktivitas, daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.



Sektor Olahraga Kantongi Potensi Kontribusi Besar Bagi Ekonomi Nasional

Didorong oleh tujuan ini sekaligus bertepatan dengan jelang Hari Olahraga Nasional ke-40, Bidang Industri Olahraga Kadin Indonesia mengadakan Diskusi Panel yang mengusung tema "Antara Prestasi dan Industri". Diskusi yang dilaksanakan pada 8 September 2023 ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PB PABSI Rosan Roeslani, dan Presiden National Olympic Committee (NOC) Indonesia Raja Sapta Oktohari.

(lanjutan di halaman 30)



Diskusi interaktif ini fokus membahas mengenai peningkatan peran industri olahraga dalam mendorong perkembangan olahraga prestasi di Indonesia, mendorong tumbuhnya industri dan ekonomi nasional yang mensejahterakan masyarakat olahraga nasional, dan meningkatkan kontribusi olahraga dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Turut hadir pula sebagai audiens dalam diskusi ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), para pengusaha industri olahraga, Persatuan Panahan Indonesia (Perpani), Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), serta beberapa cabang olahraga lainnya.

Diskusi ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka membentuk Asosiasi Produsen, Jasa, dan Penyedia Peralatan Olahraga Indonesia yang merupakan inisiatif dari Kadin Indonesia. MoU ini ditandatangani oleh Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero, Fast Archery Pro Shop, PT. Kuda Pacu Indonesia, Berca Sportindo GPN/League, dan PT. Kreatif Pikiran Komunika.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Bidang LHK Kadin Indonesia Bekerja Sama dengan Donor dari FCDO

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memperkenalkan konsep Pengelolaan Hutan Lestari atau *Sustainable Forest Management* (SFM). Konsep ini merupakan konsep dinamis yang terus berkembang untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan sumber daya hutan demi kepentingan generasi saat ini dan mendatang. SFM dirumuskan untuk memastikan bahwa hutan menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan serta berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Sejalan dengan visi pemerintah ini, Kadin Indonesia melalui Program Regenerative Forest Business berupaya untuk mendukung penguatan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari (SFM) melalui integrasi bisnis multi produk untuk meningkatkan nilai tambah peran bisnis kehutanan terhadap proteksi dan peningkatan kapasitas fungsi lingkungan ekosistem hutan, peningkatan peran sosial, dan peningkatan nilai tambah terhadap kinerja finansial bagi masyarakat dan pengusaha.

(lanjutan di halaman 31)

Untuk semakin menunjang berjalannya program ini, Bidang LHK Kadin Indonesia mendapatkan kerja sama donor dari Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) melalui Palladium dan Systemiq untuk program lanjutan Regenerative Forest Business (Partnerships for Forest). Melalui kolaborasi yang tercipta ini, Kadin Indonesia akan menentukan lanskap prioritas di wilayah hutan terutama di Kalimantan dan Sumatra yang akan dikembangkan melalui skema *regenerative forest business*.

Lebih lanjut, akan turut dijajaki kerja sama dengan para pemilik konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk mengimplementasikan skema Multi Usaha Kehutanan (MUK). Kolaborasi ini akan berlangsung sejak 1 September 2023 hingga Februari 2024.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Kadin Indonesia Temui Sampoerna Agro, Fokus Perkuat Skema Pengelolaan Hutan yang Regeneratif

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang ditetapkan sejak 2021, yaitu pendekatan Multi Usaha Kehutanan (MUK). Pendekatan ini merupakan penerapan praktik usaha kehutanan yang mencakup pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dengan tujuan mengoptimalkan kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.

Bagi para pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), regulasi ini menjadi peluang besar karena adanya potensi pendapatan lain di samping pemanfaatan kayu tanpa perlu mengurus perizinan baru. Terlebih lagi, pemerintah saat ini kian ketat dalam mengambil tindakan tegas atas PBPH yang tidak aktif atau tidak memanfaatkan lahan dengan baik.

Pada Agustus lalu, Kadin Indonesia telah melaksanakan Owners Lunch Meeting dengan Para pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pengurus Bidang LHK melalui Tim *Regenerative Forest Business Hub* (RFBH) melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Sampoerna Agro pada 6 September 2023.



Bertempat di kantor Sampoerna Agro, pertemuan ini mengusung konsep dengan lebih interaktif dan dua arah yang dibalut dengan skema *one-on-one* dengan masing-masing PBPH. Dialog ini sebagai tindak lanjut dari pembahasan pada Owners Lunch Meeting yang lalu yang fokus membahas terkait peluang dan tantangan pengelolaan PBPH dengan skema multi usaha kehutanan. Pada pertemuan lanjutan ini turut dijelaskan secara lebih rinci mengenai skema dan metode dalam pengelolaan hutan yang regeneratif sesuai hasil kajian ilmiah Kadin melalui project RFBH sebelumnya.

(lanjutan di halaman 32)

Masih dalam agenda kepentingan yang sama yaitu *one-on-one* dengan masing-masing PBPH, Pengurus Bidang LHK melalui Tim RFBH menginisiasi pertemuan dengan komisaris dan direksi dari beberapa perusahaan pemilik konsesi, pada 7 September 2023 yang bertempat di kantor Ratah Timber, Jakarta.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Kadin Indonesia Himpun Aspirasi Berbagai Sektor terkait RPP Perlindungan Data Pribadi



Perlindungan data pribadi masih menjadi PR besar di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, terdapat 311 kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia selama tahun 2022. Dan selama paruh pertama tahun 2023, telah terjadi 149 kasus kebocoran data pribadi yang terdiri dari 50 insiden dugaan kebocoran data dan 99 laporan notifikasi proaktif *darkweb*.

Perlindungan data pribadi menjadi manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia yang menjadikan perlindungan data pribadi tergolong dalam perlindungan HAM. Pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi hak fundamental masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP) sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). RPP PDP yang tengah disusun pemerintah ini mengatur secara lebih detail amanat UU PDP yang meliputi ketentuan mengenai kegiatan pemrosesan data pribadi, termasuk perihal pengungkapan dan penganalisisan data pribadi.



Secara substansi, regulasi ini mengatur hal subjek data pribadi atau hak perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban para pengendali dan prosesor data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi. Selain melibatkan para ahli dan perwakilan berbagai bidang dalam penyusunannya, Kominfo juga membuka partisipasi publik terhadap penyusunan RPP PDP untuk memastikan tersusunnya rancangan peraturan yang inklusif dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Tanggapan dari masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui laman resmi <https://pdp.id> yang sudah dapat diakses sejak 31 Agustus 2023 lalu.

(lanjutan di halaman 33)

Mendorong Inklusivitas dalam Penyusunan RPP Perlindungan Data Pribadi

Sebagai organisasi yang mewadahi para pelaku usaha di Indonesia, Kadin Indonesia telah menghimpun masukan dari anggota dan juga industri terkait penyusunan RPP PDP ini. Melalui Bidang Kominfo, Kadin Indonesia melakukan survei dan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 8 September 2023. Pengurus Kadin Indonesia, pemangku kepentingan terkait, perwakilan sektor ekonomi digital, firma hukum, dan perusahaan ekosistem digital fokus mendiskusikan poin-poin utama dari RPP PDP yang memuat lebih detail mengenai amanat UU PDP, yang meliputi ketentuan mengenai kegiatan pemrosesan data pribadi, termasuk soal pengungkapan dan penganalisisan data pribadi.

Sebagai tindak lanjut atas agenda ini, Bidang Kominfo telah menyelesaikan seluruh proses pengumpulan masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam FGD ini pada 15 September 2023. Hasil survei dan FGD tersebut terangkum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM ini kemudian akan diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai wujud apresiasi atas semangat kolaborasi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola data dan perlindungan terhadap konsumen.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Kadin Indonesia Terima Kunjungan dari PPLBI

Pusat Logistik Berikat mengacu kepada Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.



Data Pusat Logistik Berikat Indonesia yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan menunjukkan, pada tahun 2023, terdapat 105 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang beroperasi di Indonesia, dimana jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 95 PLB.

Masih terbukanya kesempatan kolaborasi di sektor ini, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok, Akbar Djohan, bersama dengan pengurus menerima kunjungan resmi dari Ketua Umum Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI), Utami Prasetiawati. Pertemuan yang dilaksanakan pada 7 September ini merupakan bagian dari upaya untuk membahas rencana PPLBI untuk mendaftar sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia.

Hingga saat ini, PPLBI terdiri dari 150 perusahaan anggota terdaftar yang beroperasi di berbagai sektor industri. Rencana PPLBI yang akan menjadi ALB Kadin Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha sektor ini dalam dunia bisnis dan perdagangan nasional.



Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah potensi yang dimiliki oleh Pusat Logistik Berikat untuk mendukung industri tertentu, seperti industri farmasi dan kosmetik. PPLBI berkomitmen untuk memaksimalkan ruang bisnis yang mereka miliki guna membantu industri-industri ini dalam mengurangi biaya logistik nasional. Ini akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing industri tersebut di pasar domestik dan internasional.



Lebih lanjut, Utami Prasetiawati juga menyampaikan rencananya untuk bersinergi dengan Badan Logistik dan Rantai Pasok (BLRP) Kadin Indonesia. Kolaborasi ini akan memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang logistik dan rantai pasok, serta membuka peluang untuk pengembangan inisiatif bersama yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis di sektor logistik.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Kadin Indonesia Tunjukkan Dukungan terhadap RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan lima tahun pertama dari periode pelaksanaan RPJPN 2025-2045. Oleh karena itu, dalam lima tahun mendatang, penting bagi Indonesia untuk mengatur strategi dan melakukan penataan kembali langkah-langkah demi tercapainya pendapatan perkapita Indonesia yang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*).



Kadin Indonesia terus menunjukkan dukungan terhadap berjalannya RPJMN Bappenas dan turut berkontribusi pada pencapaian target yang ditetapkan, salah satunya dengan menginisiasi Forum Diskusi Potensi Dukungan Anggota Luar Biasa (ALB). WKU Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, bersinergi dengan WKU Bidang PPN, Herman Heru Suprobo, untuk menyelenggarakan Diskusi ALB pada 19 September yang turut mengundang Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Erwin Dimas, Wakil Ketua Umum Bidang Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso, dan Founder & Senior Partner Skha Consulting Herianto Pribadi sebagai pembicara.

(lanjutan di halaman 35)

Dalam kapasitasnya sebagai wadah bagi para pengusaha di Indonesia, diskusi ini memiliki beberapa tujuan pokok, salah satunya untuk mengkomunikasikan capaian-capaian sebelumnya sebagai acuan untuk mendorong RPJMN 2025-2029 dan menyampaikan masukan yang terhimpun dari Kadin Indonesia kepada Kementerian PPN dalam upaya pencapaian RPJMN 2025 - 2029. Pertemuan ini merupakan bentuk sinergi harmonis antara Kadin Indonesia dengan Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus mengajak seluruh pihak terkait untuk mendorong terciptanya RPJMN 2025 - 2029.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Kadin Indonesia Dukung Banten Jadi Smart Province

Membangun kota atau kabupaten pintar atau (*Smart City* dan *Smart Province*) saat ini tengah menjadi prioritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, tidak terkecuali provinsi Banten.

Berdasarkan keterangan dari Ketua Umum Kadin Provinsi Banten, M Azzari Jayabaya. Provinsi Banten memiliki delapan kabupaten dan kota yang masih harus mengejar ketertinggalan dalam pembangunan *Smart Province*. Terdapat batas minimal untuk memenuhi standar *Smart Province*, salah satunya adalah 80 persen wilayah kabupaten dan kota sudah memiliki master plan *smart city*.

Kolaborasi dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan konsep ini. Kadin Indonesia turut menunjukkan dukungan terhadap pembangunan *Smart Province* di wilayah Banten dengan berpartisipasi dalam seminar dan *workshop* yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) DPD Banten pada 22 September 2023.

Gelaran ini mengusung tema “Menuju Banten Maju dengan *Smart City*” sebagai upaya mendukung dan mendorong percepatan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten dalam pembangunan *Smart City* dan *Smart Province*. WKU Bidang Kominfo, Firlie H. Ganinduto hadir sebagai pembicara mewakili Kadin Indonesia dan disaksikan langsung oleh pejabat-pejabat Pemerintah Daerah di Provinsi Banten, beberapa pengurus Kadin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, perwakilan PT Krakatau Sarana Infrastruktur, dan perwakilan PT Krakatau Sarana Property. Dalam seminar tersebut, Firlie menekankan adanya enam pilar penting dalam pengembangan *Smart City* di Indonesia, antara lain, *Smart Governance*, *Smart Environment*, *Smart Society*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, dan *Smart Living*.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Kerja Sama Energi Terbarukan dan Investasi Bersama UEA-Indonesia

Seiring meningkatnya peran Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global, dibutuhkan lebih banyak dukungan bisnis dari mitra luar kawasan, salah satunya Uni Emirat Arab (UEA). Kerja sama ini penting untuk memperkuat ikatan ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan ini. Data Bank Indonesia pada bulan September 2023 mencatat bahwa investasi UEA di Indonesia telah mencapai angka yang mengesankan, yaitu sekitar 4,5 miliar USD, yang mencakup berbagai sektor ekonomi, seperti telekomunikasi, energi terbarukan, minyak, dan gas.

Cirata Floating Solar Photovoltaic Power Plant: Komitmen Indonesia-UEA Adopsi Teknologi Energi Terbarukan

Salah satu proyek kolaboratif antara UEA dan Indonesia adalah proyek ekspansi Cirata Floating Solar Photovoltaic Power Plant. Proyek ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk mengadopsi teknologi energi terbarukan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan instalasi panel surya mengambang di Bendungan Cirata, Jawa Barat, proyek ini akan menghasilkan energi bersih sebesar 245 juta kWh per tahun dan mampu memasok listrik setara untuk 50.000 rumah tangga. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, optimis bahwa proyek ini memiliki potensi untuk dikembangkan hingga mencapai kapasitas sebesar 500 MWp.



PT PLN (Persero) bersama anak usahanya, PLN Nusantara Power, akan mengawal ekspansi PLTS Terapung Cirata ini. Mereka telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada UEA-Indonesia Economic Forum pada 21 September 2023. Dengan kapasitas 192 MWp, proyek ini kini dikenal sebagai salah satu PLTS Terapung terbesar di dunia.

Indonesia-UEA Komitmen Capai Target Investasi 20 Miliar USD pada tahun 2030

Selain itu, pemerintah Indonesia dan UEA telah berkomitmen untuk mencapai target investasi sebesar 20 miliar USD pada tahun 2030. Kesepakatan ini tercantum dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh kedua negara pada bulan September 2023. Untuk mendukung komitmen ini, Indonesia dan UEA telah sepakat untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang akan membahas peluang investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi.

(lanjutan di halaman 37)

Penandatanganan MoU dan pembentukan satgas ini dilakukan dalam acara Uni Emirat Arab (UAE)-Indonesia Economic Business Forum 2023 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta. Dalam gelaran tersebut, para pengusaha dari UEA beserta dengan Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri serta Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazrouei dijamu langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Turut hadir Pengurus Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid yang memberikan sambutan secara daring.



Terdapat delapan agenda prioritas yang akan menjadi fokus satgas kedua negara, termasuk pembangunan infrastruktur kilang, pengembangan energi terbarukan seperti *geothermal*, *hydropower*, dan panel surya, serta pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Nusantara (IKN Nusantara). Selain itu, kerja sama juga akan terfokus pada pembangunan pelabuhan, perawatan pesawat, pertahanan, satelit, pengembangan mangrove untuk mengatasi perubahan iklim, hilirisasi mineral kritis, serta upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Kerja sama antara Indonesia dan UEA dalam berbagai sektor ini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi regional di ASEAN dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua negara.



Investment Coordinating Board (BKPM)



Director of Investment and Integrated License of East Java Province



Head of Investment and Integrated Services Department for Western Province of West Java Governor, Indonesia

Maspaitella
Coordinator
Investment Committee
of Planning from Kadin Indonesia



PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Optimasi Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sektor perikanan yang sangat penting. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia, hanya setelah Tiongkok. Sejalan dengan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi, perikanan menyumbang sekitar US\$27 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk sekitar 7 juta orang, berdasarkan data Laporan Statistik Perikanan Indonesia Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).



Potensi besar di sektor perikanan ini dapat dioptimalkan melalui dua aspek utama: budidaya ikan dan aktivitas nelayan. Terutama dalam produksi ikan laut, sektor ini melibatkan berbagai pelaku bisnis dalam rantai pasokannya. Mulai dari nelayan yang menangkap ikan, pengelola dermaga pelelangan, pedagang, penyedia jasa transportasi, hingga pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang mengolah produk-produk perikanan.

Untuk meningkatkan potensi sektor ini, pengembangan kawasan hilirisasi produk kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru menjadi strategis. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya laut secara bijaksana, upaya ini memiliki potensi memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada 26 September 2023, tanda tangan perjanjian kerja sama di Gedung GPCC Gorontalo mengukuhkan komitmen dalam mengembangkan kawasan hilirisasi produk kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Turut hadir Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia, Joseph Pangalila dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyio.

Penandatanganan perjanjian ini berlangsung sejalan dengan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi 2023 di Gedung GPCC Gorontalo. Perjanjian tersebut mencakup tiga Rencana Aksi Kerja Sama yang disetujui oleh Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan bersama Ditjen PDSPKP:

(lanjutan di halaman 39)



Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Memperkuat keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kelautan dan perikanan.



Penguatan Akses Pasar dan Citra Produk

Meningkatkan akses pasar dan reputasi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di sektor kelautan dan perikanan.



Penguatan Rantai Pasok

Memperkuat akses terhadap bahan baku, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki distribusi, dan meningkatkan efisiensi logistik dalam industri produk kelautan dan perikanan.

Melalui kerja sama ini, Kadin Indonesia berkomitmen untuk memberikan manfaat besar bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi biru.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Targetkan Jadi Raja Baterai EV Dunia, Kadin Indonesia Tindaklanjuti Kerja Sama dengan Australia

Indonesia bermaksud memperluas industri baterai untuk sumber energi kendaraan listrik demi menggaet titel 'raja baterai' kendaraan listrik di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita ini, Indonesia menggandeng Australia sebagai mitra utama untuk mendapatkan bahan litium.

Pada Juli 2023, disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang perekonomian Airlangga Hartarto, Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Negara Bagian Western Australia terkait kerja sama sumber daya mineral. Rencana Aksi tersebut berkaitan dengan kerja sama critical minerals untuk periode 2023-2025. Kolaborasi tersebut didukung dalam semangat economic powerhouse yang diusung Indonesia-Australia Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, Kadin Indonesia melalui Bidang Hubungan Internasional telah melaksanakan *High Level Discussion on Critical Minerals* bersama pemerintah Western Australia. Diskusi ini secara lebih rinci membahas mengenai aspirasi Indonesia untuk menjadi pusat pemrosesan kendaraan listrik dan memanfaatkan sumber daya mineral penting Australia Barat seperti litium dan mineral Indonesia seperti nikel.

(lanjutan di halaman 40)

Merupakan sebuah harapan bersama bahwa kemitraan antara Indonesia dan Western Australia dapat membuka peluang besar di sektor mineral penting (critical minerals), mengingat Australia Barat memiliki cadangan mineral yang melimpah untuk menghasilkan baterai *electric vehicle* (EV). Australia akan menjadi pemasok litium dan Indonesia akan menjadi pemasok nikel, di mana keduanya merupakan komponen utama dalam produksi baterai EV.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Hadiri Peluncuran Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040



Australia melihat potensi yang ada di kawasan Asia Tenggara sebagai pusat kegiatan dan bisnis global. Asia Tenggara dikategorikan ke dalam kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Melihat hal ini, pemerintah Australia telah meluncurkan strategi "Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040" untuk memperdalam keterlibatan ekonomi Australia di kawasan Indonesia dan memastikan kemakmuran bersama di masa depan.



Secara lebih rinci, strategi yang dikembangkan oleh Nicholas Moore AO, Utusan Khusus untuk Asia Tenggara ini akan menetapkan jalur praktis untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi dua arah dengan Australia. Selain itu, dengan diimplementasikannya strategi ini, Australia juga dapat memanfaatkan peluang besar yang ditawarkan oleh kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang beragam dan dinamis.

Kadin Indonesia menghadiri peluncuran Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, bertemu langsung dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perwakilan khusus untuk Asia Tenggara Nicholas Moore, dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Hotel Raffles, Jakarta.

(lanjutan di halaman 41)

Peluncuran yang dilaksanakan pada 6 September 2023 ini akan sekaligus menegaskan kembali komitmen Pemerintah Australia untuk memperdalam hubungan kami dengan Asia Tenggara. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan, masa depan ekonomi Australia berada di Asia Tenggara. Strategi ini menguraikan bagaimana Australia dapat memanfaatkan pertumbuhan ini, dan memanfaatkan peluang perdagangan dan investasi yang besar di Australia.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Terus Jajaki Potensi Kolaborasi, Kadin Indonesia Laksanakan Joint Call dengan Vietnam

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Vietnam terus mencatatkan pertumbuhan yang baik. Pada tahun 2023, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Vietnam telah mencapai USD 13,31 miliar, meningkat 20,9% dibandingkan tahun 2022.



Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Vietnam telah mencapai USD 8,49 miliar, meningkat 23,6% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan impor Indonesia dari Vietnam mencapai USD 4,82 miliar, meningkat 17,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kerja sama perdagangan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan aktivitas ekspor dan impor di kedua negara dan Kesepakatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Vietnam, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Vietnam (IEV-CEPA).



Dalam misi melanjutkan rekam jejak hubungan perdagangan yang baik antar kedua negara, Kadin Indonesia melalui Bidang Hubungan Internasional melaksanakan Joint Call antara para pengusaha Indonesia dengan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, yang merupakan kerja sama dengan Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI). Pertemuan ini dilaksanakan pada 5 September 2023, bertempat di Hotel Westin, Jakarta.

(lanjutan di halaman 42)



Pada Joint Call ini turut dibahas pula mengenai keinginan pengusaha Indonesia yang telah berinvestasi untuk memperluas investasinya di Vietnam dan mengoptimalkan kerja sama perdagangan serta investasi di kedua negara. Sebagai tujuan jangka panjang, ke depannya akan diupayakan terbangunnya kerja sama yang semakin solid antara Indonesia dan Vietnam untuk meningkatkan kerja sama di bidang produk industri, komoditas, dan jasa.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Bertemu Perdana Menteri Tiongkok dalam Welcoming Reception Indonesia Tiongkok Business Community

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok terus terjalin baik dan harmonis. Menurut data dari Kementerian Perdagangan, hubungan perdagangan ini kian menguat seiring adanya perjanjian RCE. Perjanjian ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan lima negara mitra, yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru untuk memperdalam konektivitas ekonomi Indonesia dengan negara mitra.

Lebih lanjut, Tiongkok juga tercatat sebagai mitra ASEAN terbesar sejak tahun 2009 sekaligus sebagai sumber investasi asing terbesar keempat di antara mitra-mitra dialog ASEAN. Dalam rangka kunjungan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Li Qiang, Kadin Indonesia termasuk Pengurus Bidang Hubungan Internasional menghadiri Welcoming Reception Indonesia Tiongkok Business Community pada 5 September 2023.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok Wang Wentao, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan, Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, dan Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi Thohir.

Selepas dilaksanakannya pertemuan ini, diharapkan dapat terjalin kerja sama antara kedua negara yang menunjang Indonesia dalam melakukan transformasi perekonomian, seperti program hilirisasi mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan baku, mendorong industrialisasi, dan menyebarkan pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Kunjungan PM Tiongkok ke Indonesia sekaligus untuk menarik lebih banyak lagi kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi ke Indonesia.



KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Hadiri Pertemuan Tiongkok Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)



Tidak dipungkiri lagi hubungan perdagangan Indonesia dan Tiongkok terus menunjukkan performa yang baik dan meningkat. Keterangan dari Kementerian Luar Negeri mencatat, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai angka yang signifikan hingga USD 61,59 miliar.



Dalam rangka memperdalam kerja sama strategis antar kedua negara, Kadin Indonesia melalui Bidang Hubungan Internasional menghadiri pertemuan dengan Ketua China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) pada 6 September 2023. Pertemuan ini menghadirkan 61 perusahaan langsung dari Tiongkok, membahas mengenai kerja sama yang dapat menjalin hubungan baik antar kedua negara.



Untuk membangun pertemuan yang interaktif dan tepat sasaran, setiap CEO dari berbagai bidang mempresentasikan perusahaannya masing-masing dan membahas kerja sama investasi antar kedua negara yang saling menguntungkan. CCPIT akan menggabungkan kerja sama antar perusahaan, pemerintah, dan juga industri lokal dari negara yang dituju. Oleh karena itu, Kadin Indonesia diundang ke Tiongkok untuk mengikuti berbagai event, salah satunya adalah Supply Chain Industries Expo untuk melihat dan menganalisis berbagai sistem yang akan dijalankan.



KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Indonesia-Korea Business Roundtable Fokus Perkuat Kolaborasi Ekonomi

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan terus menunjukkan hasil yang positif. Korea Selatan tercatat sebagai penyumbang surplus terbesar ke-14 bagi neraca perdagangan Indonesia. Secara nilai perdagangan, total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan pada periode Januari-Oktober 2022 tercatat sebesar USD 20,58 miliar. Hal ini turut ditambah dengan ekspor dan impor Indonesia tercatat sebesar USD 10,65 miliar dan USD 9,93 miliar.

Bermaksud untuk semakin memperkuat hubungan yang telah terjalin, Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia menggelar Indonesia-Korea Business Roundtable di Jakarta. Selain dihadiri langsung oleh Presiden Korea, Yoon Suk Yeol dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, pertemuan ini juga turut melibatkan 40 pejabat dan pengusaha Indonesia dan Korea.

Pertemuan ini membahas mengenai pencapaian *net zero emission* dan dukungannya bagi kreativitas, mendukung dijajaknya kerja sama yang lebih menguntungkan antar kedua negara, dan pelaksanaan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA).

IK CEPA merupakan perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan yang mencakup bidang perdagangan barang, jasa, penanaman modal, kerja sama ekonomi, hukum, dan kelembagaan. Perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk saling mempererat hubungan ekonomi di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan. Lebih lanjut, penandatanganan perjanjian IK-CEPA merupakan tonggak penting dalam hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, mengingat Korea Selatan semakin tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai *new production base* di ASEAN.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Dorong Pemulihan Perdagangan dan Investasi dengan Turki

Pemerintah Indonesia dan Turki telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengembalikan tren positif dalam hal aktivitas ekonomi bilateral.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA). Perjanjian ini merupakan perjanjian dagang yang komprehensif antara kedua negara yang dirancang untuk membuka pintu-pintu perdagangan, mengurangi tarif dan hambatan perdagangan, serta meningkatkan akses pasar antara Indonesia dan Turki. Dengan adanya IT-CEPA, diharapkan akan lebih mudah bagi produsen dan eksportir dari kedua negara untuk menjual produk mereka ke pasar masing-masing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan volume perdagangan bilateral.

Selain itu, upaya lainnya adalah pengurangan hambatan perdagangan yang mencakup berbagai langkah untuk mengurangi rintangan atau regulasi yang mungkin menghambat perdagangan antara kedua negara. Hal ini dapat termasuk peningkatan harmonisasi regulasi, pengurangan bea masuk, dan langkah-langkah lainnya yang mempermudah aliran barang dan jasa antara Indonesia dan Turki.

Selain aspek perdagangan, menciptakan iklim investasi yang kondusif juga merupakan bagian penting dari kesepakatan ini. Ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor, seperti penyediaan perlindungan hukum yang kuat bagi investor asing, peningkatan transparansi, dan kemudahan dalam berinvestasi di kedua negara. Dengan demikian, kedua negara berharap untuk menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan kerja sama ekonomi jangka panjang.

Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama Indonesia dan Turki untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Pertemuan antara pengurus Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia dan DEIK Turkiye pada 6 September 2023 di Menara Kadin Indonesia memperkuat upaya Pemerintah Indonesia dan Turki untuk memulihkan perdagangan dan investasi bilateral. Diskusi dalam pertemuan ini fokus pada masalah *supply chain* dan distribusi antara kedua negara serta dukungan terhadap Indonesia-Turkey CEPA, mencerminkan komitmen sektor swasta dalam meningkatkan kerja sama ekonomi. Hal ini penting dalam rangka menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mengaktifkan perjanjian dagang komprehensif tersebut.



KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia dan CityUK Berkolaborasi dalam Green Financing untuk Kemajuan Ekonomi Berkelanjutan

Kerja sama antara Indonesia dan CityUK merupakan kemitraan strategis yang bertujuan untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi kedua negara. CityUK adalah sebuah organisasi yang mewakili industri layanan keuangan dan para profesional terkait di Inggris. Organisasi ini berdedikasi untuk mempromosikan ekosistem keuangan yang berhasil dan mendukung anggotanya, serta memajukan kebijakan yang mendukung daya saing di Inggris, Eropa, dan tingkat internasional. Mereka berfokus pada upaya untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan mendukung industri keuangan.

Dalam upaya membangun kerja sama dengan Indonesia, Kadin Indonesia dan CityUK melihat peluang yang sangat besar dalam bidang *green financing*. Potensi kerja sama ini merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan mendukung proyek-proyek yang berfokus pada lingkungan dan berkelanjutan, seperti investasi dalam energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan proyek-proyek ramah lingkungan lainnya.



Pengurus Bidang HI Kadin Indonesia pun menghadiri pertemuan dengan CityUK yang dilaksanakan pada 6 September 2023 di Menara Kadin Indonesia. Kadin Indonesia dan CityUK melihat bahwa investasi dan pengembangan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak, dengan Indonesia mendapatkan akses ke pengalaman dan sumber daya dari CityUK untuk memajukan sektor keuangannya, sementara CityUK mendapatkan akses ke pasar yang berkembang dan berpotensi besar di Indonesia. Kerja sama semacam ini juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan hubungan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.



Selain itu, kerja sama ini juga dapat berpotensi menjadi model untuk negara-negara lain yang tertarik untuk mengembangkan sektor keuangan berkelanjutan dan berkontribusi pada tujuan global dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga lingkungan.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Mengukuhkan Hubungan Strategis Indonesia-Tiongkok melalui Pertemuan KIKT dan NDRC

Tiongkok memegang peran penting sebagai mitra strategis bagi Indonesia. Fakta ini terbukti dengan posisinya sebagai investor terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2022. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi dari Negeri Tirai Bambu ke Indonesia mencapai angka US\$5,18 miliar pada tahun 2022.

Pencapaian ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 63,92% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Bahkan, pencapaian ini juga mencatatkan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Momentum yang kuat dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok terus berkembang. Pada 27 September 2023, di Ruang Sinarmas Menara Kadin Indonesia, sebuah pertemuan yang sangat penting diadakan antara Komite Indonesia Kadin Tiongkok (KIKT) dan the National Development and Reform Commission NDRC) atau Komite Pengembangan dan Reformasi Nasional Tiongkok. Acara ini dihadiri oleh anggota Komite KIKT dan anggota The International Cooperation Center (ICC) NDRC, Rachmad Wijaya Sakti. Dalam pertemuan ini, NDRC memperkenalkan jajaran kementerian mereka kepada delegasi dari Kadin Indonesia.



NDRC merupakan bagian integral dari pemerintahan Tiongkok dan juga dikenal sebagai salah satu kementerian terbesar di Tiongkok. Salah satu tujuan utama dari pendirian NDRC adalah untuk menjalin hubungan dan kerja sama yang erat dengan negara-negara lain. NDRC memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan industri dan menjalankan komunikasi yang efektif dengan negara-negara luar, terutama dalam hal hubungan internasional dan kerja sama dengan Perusahaan Multinasional.

Pertemuan ini mencerminkan langkah yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara Kadin Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Kadin Indonesia berharap dengan kolaborasi yang semakin erat ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan bisnis di kedua negara. Hal ini juga menunjukkan kontribusi nyata Kadin Indonesia terhadap kebijakan fiskal Indonesia serta tekad untuk memperkuat hubungan ekonomi internasional.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Terlibat dalam Belt and Road Global Forum Annual Roundtable 2023

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan strategi pembangunan infrastruktur global yang diinisiasi oleh pemerintah Tiongkok pada 2013 yang memungkinkan investasi dan pembangunan infrastruktur di 152 negara dan organisasi internasional. Program ini diperkenalkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai bagian dari rencana besar pemerintah Tiongkok untuk menghidupkan kembali kejayaan Jalur Sutera (Silk Road) di abad ke-21. Bank Dunia sendiri menyatakan BRI sebagai upaya ambisius untuk meningkatkan kerja sama regional dan konektivitas antarbenua.



Dalam upaya menciptakan forum yang mempertemukan berbagai negara terkait program ini, The Hong Kong Trade Development Council menyelenggarakan The Belt and Road Global Forum Annual Roundtable pada 15 September 2023. Mengusung tema “Navigating New Horizons: Collaborate and Connect”, forum ini mempertemukan perwakilan dari berbagai negara di dunia untuk bertukar pandangan mengenai Belt and Road Initiative, termasuk menjajaki peluang kerja sama yang menguntungkan.

Mewakili Kadin Indonesia, WKU Bidang Hubungan Internasional, Bernadino Vega, turut terlibat dalam roundtable discussion yang dilaksanakan di Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Dalam diskusi tersebut, Kadin Indonesia secara spesifik membahas topik seputar Building Resilience to Supply Chain Risk. Keterlibatan Kadin Indonesia dalam agenda ini merupakan sebuah langkah penting dalam menjalin kerjasama internasional dan memastikan bahwa Indonesia tetap terhubung dengan perkembangan dunia yang dinamis.



KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Terus Terjalin Harmonis, Kadin Indonesia Adakan Pertemuan dengan Komite Bilateral Malaysia

Hubungan perdagangan Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan tren yang positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Malaysia pada tahun 2023 mencapai US\$18,77 miliar, meningkat 20,9% dibandingkan tahun 2022. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Malaysia mencapai US\$12,02 miliar, meningkat 23,6% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan impor Indonesia dari Malaysia mencapai US\$6,75 miliar, meningkat 17,2% dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Malaysia tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19, peningkatan aktivitas ekspor dan impor di kedua negara, dan Kesepakatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Malaysia-Singapura (IMT-CEPA).

Bertempat di Graha CIMB Niaga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, membuka agenda tersebut dengan memberikan *keynote speech*. Pertemuan ini turut dihadiri langsung pula oleh WKU Koordinator Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, Duta Besar Malaysia HE Dato' Syed Md Hasrin Tengku Hussin, Chairman ABAC Malaysia Tan Sri Nazir Razak, WKU Bidang HI Bernardino M. Vega, beberapa pengurus Kadin Indonesia, para pengusaha Indonesia, serta delegasi pengusaha Malaysia.

Selain mendukung kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia, pertemuan ini juga sekaligus dalam rangka menyambut delegasi Malaysia yang hadir pada acara ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023.



SPECIAL SECTION | ASEAN-BAC 2023



Indonesia Sukses Jadi Tuan Rumah ASEAN-BAC 2023

Pertumbuhan Ekonomi ASEAN pada tahun 2024 diperkirakan akan menjadi yang tertinggi di dunia, mencapai 4,5% *year-on-year* (YoY). Ini adalah indikator kuat bahwa ASEAN memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan menarik perhatian dunia. Selain itu, ASEAN juga menjadi kawasan dengan destinasi menarik bagi *Foreign Direct Investment* (FDI) di tahun 2022, dengan 17% FDI masuk ke ASEAN.

Semua pencapaian ini menjadi modal besar bagi ASEAN dalam mencapai cita-cita menjadi *epicentrum of growth*. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan investasi yang signifikan menciptakan peluang besar bagi negara-negara anggota ASEAN.

Indonesia, dalam perannya sebagai Ketua ASEAN-BAC Tahun 2023, secara signifikan telah menciptakan landasan kokoh untuk memudahkan para pelaku usaha berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi di kawasan. Ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN.

Dengan tema yang diusung, yaitu "ASEAN Centrality: Innovating towards Greater Inclusivity," ASEAN-BAC bertekad untuk menjadikan ASEAN sebagai tujuan investasi dan perdagangan paling menarik di dunia. Mereka ingin memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

8 Proyek Warisan

Indonesia mengangkat lima isu prioritas, yaitu transformasi digital (*digital transformation*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), ketahanan kesehatan (*health resilience*), ketahanan pangan (*food security*), serta memfasilitasi perdagangan dan investasi (*trade & investment*) yang diprioritaskan untuk meningkatkan peran strategis pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di negara-negara anggota ASEAN.

Telah dilakukan kajian mendalam dan *roadshow* untuk mendapatkan dukungan negara-negara mitra, seperti Tiongkok, Kanada, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. ASEAN-BAC sangat fokus pada sentralitas, inovasi, dan inklusivitas, yang bersumber dari nilai-nilai fundamental 5P, yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*.

Pembahasan lima isu prioritas dikembangkan menjadi delapan *legacy project*, yang terdiri atas ASEAN QR Code, Marketplace Lending Platform, Wiki Entrepreneur, ASEAN Net Zero Hub, Carbon Center of Excellence, ASEAN One Shot Campaign, Inclusive Closed-Loop Model for Agricultural Product, dan ASEAN Business Entity.

(lanjutan di halaman 51)



Presiden Joko Widodo Buka ASEAN Business Investment Summit: Dorong Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan

Terdapat beberapa rangkaian acara dalam ASEAN-BAC. Salah satunya adalah ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2023 yang diselenggarakan pada 1 September 2023 di Istana Negara, Jakarta.

Rangkaian kegiatan gelaran ABIS dibuka Presiden RI, Joko Widodo, dihadiri oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta para pelaku usaha negara-negara ASEAN. Sebanyak 150 partisipan hadir dalam pembukaan ABIS, termasuk pengurus Kadin Indonesia, serta delegasi bisnis Indonesia dan ASEAN turut hadir dalam kesempatan ini.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ASEAN butuh strategi taktis yang *extraordinary*. Strateginya bukan strategi besar, tetapi taktis yang *extraordinary*, sehingga butuh kolaborasi yang semakin solid.

“Saya juga berharap konsep ASEAN Incorporated yang tadi disampaikan oleh Pak Arsjad, yang diperkenalkan oleh ASEAN-BAC mampu menjadi jembatan komunikasi untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan sehingga mampu memperkuat daya saing ASEAN dan meningkatkan kesejahteraan ASEAN,” tandas Jokowi.

Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua ASEAN-BAC Arsjad Rasjid menyatakan, Indonesia berhasil menciptakan sebuah era baru dalam berbisnis di negara-negara Asia Tenggara, “Kami telah meletakkan landasan kokoh untuk memudahkan pelaku usaha mengembangkan bisnis, mewujudkan kawasan yang stabil dan damai, menjunjung tinggi hukum internasional, dan nilai-nilai kemanusiaan di ASEAN. Ini menjadi pegangan penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan peranannya,” kata Arsjad.

ASEAN Weekend Market 2023

Di samping ABIS 2023, Kadin Indonesia, bersama dengan ASEAN-BAC telah mengadakan acara "ASEAN Weekend Market" di Gedung Serbaguna Senayan pada tanggal 1-3 September 2023.

Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan dorongan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari negara-negara anggota ASEAN.



Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Chairman ASEAN-BAC, Arsjad Rasjid, menjelaskan bahwa dalam acara ini, mereka berhasil mengumpulkan 45 pelaku UMKM dari Indonesia, Myanmar, hingga Kamboja. Harapannya adalah agar para pelaku usaha ini dapat mempromosikan produk mereka dan membuka peluang kolaborasi antara satu dengan yang lain.

"Pentas ini diadakan untuk memajukan keunggulan UMKM ASEAN agar bisa bersaing secara global," ujarnya saat pembukaan ASEAN Weekend Market di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, pada 1 September 2023.

Mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu hal yang sangat krusial. Ini bukan tanpa alasan, mengingat besarnya peran yang dimainkan oleh UMKM dalam menggerakkan perekonomian negara-negara di wilayah ASEAN maupun secara lebih luas. Arsjad Rasjid menyoroti bahwa UMKM di kawasan ASEAN memiliki andil yang signifikan, dengan menyerap sekitar 35 hingga 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 35 hingga 69 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masing-masing negara.



Borneo Business Roundtable Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan memiliki segudang potensi dan kekayaan sumber daya alam. Sebagai pulau terbesar ketiga di dunia, Kalimantan merupakan rumah bagi salah satu hutan hujan tertua di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 24 juta jiwa, pulau Kalimantan menyimpan potensi signifikan untuk meningkatkan perdagangan di kota-kota di tiga negara yang mendiami pulau tersebut, seperti Brunei, Kalimantan, Labuan, Sabah, dan Sarawak.

Dalam rangka membuka peluang terhadap potensi yang tersedia, telah dilaksanakan Borneo Business Roundtable, yang merupakan forum Inisiatif ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Indonesia dan Brunei Darussalam untuk mendorong Perdagangan dan Investasi di Kalimantan, Sabah, Sarawak, dan Labuan. pertemuan ini diadakan pada 5 September 2023 dan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua ASEAN-BAC Brunei Darussalam, Puan Haslina Taib, dan Deputy Investasi dan Pendanaan Otorita IKN (OIKN), Agung Wicaksono.



Formalisasi Borneo Economic Community (BEC)

Borneo Business Roundtable tidak hanya didasari oleh tujuan ekonomi semata, namun yang paling utama adalah mendorong agar Borneo dengan cepat menjadi komponen utama untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini mencapai suatu kesepakatan bersama, yaitu formalisasi Borneo Economic Community (BEC), yang merupakan kerja sama sektor swasta di Kalimantan, Sabah, Sarawak, Labuan, dan Brunei Darussalam untuk melihat kekuatan potensial di wilayah Borneo. Selain itu, pada pertemuan tersebut juga sekaligus dilakukan *launching* pendaftaran minat ke Dagang Borneo Digital Marketplace.

(lanjutan di halaman 54)



Masih dalam momentum perhelatan KTT ASEAN 2023, pertemuan ini juga turut menyoroti epicentrum of growth di Borneo, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN). Formalisasi komunitas di Borneo digadang-gadang akan menjadi sesuatu yang sentral untuk memastikan bahwa prioritas-prioritas dan *legacy project* ASEAN tetap diusung, mulai dari transformasi digital sampai pembangunan berkelanjutan, perdagangan, hingga investasi.

Indonesia-Myanmar Roundtable Dialogue: Sepakati Kerja Sama di Lima Sektor

Sebagai salah satu anggota ASEAN, Myanmar telah memiliki rekam jejak kerja sama yang baik dengan Indonesia. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), volume perdagangan Indonesia dengan Myanmar pada tahun 2022 mencapai USD 1,28 miliar dengan komoditas ekspor minyak kelapa sawit, pupuk, besi, dan kendaraan.



Masih dalam rangkaian acara ASEAN Business and Investment Summit 2023, telah dilaksanakan Indonesia-Myanmar Roundtable Dialogue di Jakarta. Dialog yang dilaksanakan pada 5 September 2023 ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia merangkap Chair of ASEAN-BAC Arsjad Rasjid, Alternate Chair of ASEAN-Business Advisory Council (BAC) Bernardino M. Vega, Ketua Komite Bilateral Kadin untuk Myanmar dan Laos Alvin Anderson Halum, Presiden Federasi Kamar Dagang dan Industri Myanmar U Aye Win, dan Sekretaris Federasi Kamar Dagang dan Industri Myanmar Khine Khine Nwe.

Pertemuan Indonesia-Myanmar Roundtable Dialogue telah menyepakati kerja sama perdagangan dan investasi di lima sektor yang meliputi pertanian, garmen, produk konsumen, energi, dan layanan keuangan. Kelima bidang ini dinilai memiliki potensi dalam pengembangan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Myanmar.



Alternate Chair of ASEAN-Business Advisory Council (BAC), sekaligus WKU Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia, Bernardino M. Vega, mengatakan, Kadin Indonesia dan Myanmar melalui Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry telah sepakat untuk membentuk Pokja (Kelompok Kerja) dalam upaya mewujudkan kerja sama di lima sektor ini berjalan sukses.

(lanjutan di halaman 55)

Kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik memiliki modal kekuatan yang besar dengan total populasi sebanyak 680 juta jiwa. Hal ini dapat menjadi pasar yang potensial dengan peluang investasi menjanjikan. Lebih lanjut, Presiden RI, Joko Widodo, mengatakan keberadaan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) akan mengubah rivalitas di kawasan Indo-Pasifik menjadi kerja sama yang bermanfaat. Dengan demikian, kawasan ini dapat membangun kerja sama yang mengutamakan asas saling menguntungkan.

Forum ini memiliki tiga agenda utama, yaitu Kesiapan Infrastruktur Hijau dan Rantai Pasok yang Tangguh (*Green Infrastructure and Resilient Supply Chain*), Pembiayaan Berkelanjutan dan Inovatif (*Inclusive Digital Transformation and Creative Economy*), dan Pembiayaan berkelanjutan dan inovatif (*Sustainable and Innovative Financing*).

Kadin Indonesia turut menaruh perhatian khusus terhadap agenda AIPF ini. Hal ini tergambarkan pada keterlibatan Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan (BKMJK) Kadin Indonesia, Tigor MM. Siahaan, yang menghadiri diskusi pada agenda ketiga "Inclusive Digital Transformation".

Menurut data dari hasil KTT ke-43 ASEAN, dari kontribusi negara ASEAN dan mitra ASEAN sejauh ini tercatat 93 proyek kerja sama senilai US\$38,2 miliar. Selain itu, ada 73 proyek potensial senilai USD 17,8 miliar. Dengan dibahasnya tiga hal ini, diharapkan akan terbangun kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur.

Kadin Indonesia Tekankan Pentingnya Penguatan UMKM dalam Perhelatan ASEAN



ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) telah menyelenggarakan ASEAN-BAC Indonesia's Summit Week 2023 pada 1-6 September 2023. Dengan keterlibatan pemimpin pemerintah, pemilik bisnis dan pemimpin di kawasan ASEAN serta berbagai negara lainnya, gelaran ini merupakan bentuk kontribusi positif pada visi Kekuatan ASEAN Indonesia tahun ini, sekaligus menjadi bagian dari penyusunan ASEAN Vision 2045.

(lanjutan di halaman 56)

Sejalan dengan aspek *Epicentrum of Growth* di ASEAN, kawasan ASEAN memiliki potensi perdagangan dan kewirausahaan yang besar untuk berkembang. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023, ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai USD3.36 triliun pada 2021, didukung dengan jumlah populasi di kawasan ASEAN yang mencapai lebih dari 650 juta jiwa.

Perhelatan ASEAN tahun ini berfokus pada lima isu prioritas kemudian dikembangkan menjadi delapan proyek warisan, yaitu ASEAN QR Code, Marketplace Lending Program, Wiki Entrepreneur, ASEAN Net Zero, Carbon Center of Excellence, ASEAN One Shot Campaign, Inclusive Closed Loop Model for Agricultural Product, dan ASEAN Business Entity. Kedelapan proyek warisan ini merupakan upaya nyata dan praktik konkret untuk mewujudkan lima prioritas program di atas.

Kadin Indonesia melalui Bidang Kewirausahaan turut ambil bagian dalam perhelatan ASEAN. WKU Bidang Kewirausahaan dan Lead dari *Legacy Program* Wiki Entrepreneurship, Aldi Haryoprato, menghadiri beberapa agenda ASEAN, antara lain, peluncuran proyek warisan (*legacy program*) pada 4 September 2023 di Sultan Hotel, Asean Business Awards gala dinner di The Ritz Carlton Pacific Place pada 5 September 2023, Asean Dinner di Plataran Senayan pada 6 September 2023, dan turut hadir pula dalam beberapa *business discussion & roundtable*.

Pada kesempatan tersebut, Aldi juga turut menyampaikan beberapa poin penting, khususnya cara untuk meningkatkan skala UMKM dengan program *inclusive closed loop model* serta strategi membawa UMKM untuk masuk ke pasar global melalui kegiatan ekspor.



SPECIAL SECTION | ISF 2023

Gelaran ISF 2023: Aksi Nyata Menuju Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif

Indonesia sebagai aktor penting agenda global Perubahan Iklim dan *Sustainable Development Goals* (SDG), telah mengintegrasikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Sejalan dengan hal ini, Indonesia juga telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060. Demi mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, diperlukan sinergi yang solid dari berbagai pihak, tidak terkecuali pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Pelaku bisnis dan korporasi juga telah menyadari potensi jangka panjang yang cukup besar dengan mendorong ekonomi hijau.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan target ambisius tersebut, Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan Kadin Indonesia untuk menyelenggarakan Indonesian Sustainability Forum (ISF) 2023 pada 7-8 September 2023. Gelaran ini merupakan salah satu perhelatan global terbesar mengenai isu-isu keberlanjutan di Asia Pasifik.



Penyelenggaraan ISF 2023 turut mengundang para pemimpin dari pemerintah, lembaga internasional, bisnis, dan think tank untuk berbagi success story dan pembelajaran tentang upaya dekarbonisasi serta memfasilitasi aksi nyata melalui perjanjian dan kolaborasi internasional. Turut hadir pada pembukaan gelaran ISF, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Managing Director IMF Kristalina Georgieva, dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape.

and Otorita Ibu Kota Nusantara



Secara total, forum ini akan menghadirkan 10 sesi pleno dan 14 sesi tematik. Terdapat lima topik utama yang menjadi fokus pembahasan dalam sesi diskusi yang dilakukan, antara lain peluang bisnis berkelanjutan di Indonesia, pemberdayaan teknologi dan sumber daya manusia untuk merintis jalur pertumbuhan yang berkelanjutan, perlindungan biodiversitas serta peluang ekonomi berkelanjutan bagi planet yang layak huni, kemajuan dalam menangkap karbon untuk membalikkan perubahan iklim, serta perluasan pasar karbon untuk mempercepat pengurangan emisi.

Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

WKU Koordinator Kadin Indonesia Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, mengatakan, forum ini merupakan kesempatan bagi sektor swasta untuk memberikan kontribusi yang konkret dan berarti bagi agenda keberlanjutan. Sektor swasta telah menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, oleh karena itu setiap perubahan positif yang diupayakan untuk mendukung agenda keberlanjutan akan memberikan efek domino yang positif bagi masyarakat dan keberlangsungan bumi. Penyelenggaraan ISF 2023 ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan berkontribusi kepada transisi energi hijau dan ekonomi inklusif yang lebih cepat di Indonesia. MoU tersebut antara lain, kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Karbon Korea Co, Ltd, Stanford Doerr School of Sustainability dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), serta Inspira dan Original Equipment Manufacturers (OEM).

(lanjutan di halaman 59)

Rakor Bidang dan Pokja Sustainability

Mengambil momentum yang sama, turut diselenggarakan pula Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang dan Pokja Sustainability. Agenda yang mengusung tema “Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Maritim yang Berkelanjutan melalui Investasi Hijau” ini dihadiri dan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut B. Pandjaitan dan dipimpin oleh WKU Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani.



Rakor yang diselenggarakan pada 7 September ini juga dihadiri oleh Deputy III atau Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin, WKU Bidang Hubungan Internasional Bernardino Vega, WKU Bidang Lingkungan Hidup Silverius Oscar Unggul, WKU Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya, WKU Bidang Pariwisata & Kreatif Triawan Munaf, WKU Bidang Kelautan dan Perikanan Joseph Pangalila, WKU PUPR & Infrastruktur Insannul Kamil, dan para Ketua Program Dharsono Hartono, Ketua Sub-Pokja Sustainability Anthony Utomo, perwakilan Kadin Net Zero Hub Syarika, perwakilan Pilot Project Bambu Faizal Safa, dan WKU Bidang Perdagangan Juan P. Adoe.

SPECIAL SECTION | HUT KADIN KE-55

Turnamen Golf Kadin Indonesia: Perhelatan Jelang HUT ke-55 Kadin Indonesia

Dalam rangka menyambut Ulang Tahun ke-55 Kadin Indonesia yang dirayakan setiap 24 September, Kadin Indonesia bersama dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), menggelar turnamen golf yang berlangsung di Pondok Indah Golf Course Jakarta. Gelaran turnamen golf ini pun turut dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anggota ASEAN-BAC, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta para pengurus Kadin Indonesia dan Kadin daerah.

Tidak hanya sekadar kompetisi olahraga bersama, turnamen golf ini bertujuan untuk menciptakan peluang bagi para pelaku usaha dan perwakilan pemerintah Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih erat. Berfungsi sebagai forum networking antar pihak, turnamen golf ini sekaligus menjadi wujud komitmen Kadin Indonesia dalam memelihara dan meningkatkan hubungan yang baik antara dunia usaha dan pemerintah, serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN.



Dengan menggabungkan unsur olahraga dengan diplomasi bisnis, Kadin Indonesia menunjukkan kesungguhan mereka dalam mendukung dan mempromosikan kerja sama ekonomi regional dan internasional.

SPECIAL SECTION | HUT KADIN KE-55



Masih dalam semangat jelang perayaan HUT ke-55 Kadin Indonesia, kali ini Bidang Industri Olahraga Kadin Indonesia menggandeng RANS ESPORT dalam penyelenggaraan acara Piala Ketua Kadin E-Sports. Turnamen ini mempertemukan sebelas tim olahraga elektronik (*electronic sports/E-Sports*) yang berkompetisi dengan tekad untuk meraih prestasi tertinggi. Partisipasi tim-tim E-Sports ini tidak hanya menunjukkan semangat kompetitif yang kuat dalam industri E-sports, tetapi juga mencerminkan dukungan yang diberikan oleh dunia bisnis, terhadap perkembangan dan promosi olahraga elektronik di Indonesia.



Terjalinnya kolaborasi di sektor olahraga elektronik ini kian menegaskan pentingnya posisi esport dalam dunia olahraga modern. E-Sports telah menjadi fenomena global yang mendapat perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Indonesia ESports Premier League (IESPL), jumlah pemain E-Sports di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 62,1 juta orang, dimana jumlah ini meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain sebagai ajang kompetisi, Piala Ketua Umum Kadin Indonesia E-Sports juga menjadi wadah untuk mempromosikan semangat kolaborasi antara industri, pemerintah, dan komunitas E-Sports. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat ekosistem E-Sports di Indonesia, menciptakan peluang bisnis baru, dan memajukan industri olahraga secara keseluruhan. Berlangsung selama 8-10 September 2023, seluruh rangkaian pertandingan dan acara ini disiarkan langsung melalui YouTube channel RANS ESPORT, menciptakan akses yang lebih luas bagi penggemar E-Sports di seluruh Indonesia untuk menikmati kompetisi tersebut.



SPECIAL SECTION | HUT KADIN KE-55

Rayakan HUT Ke-55: Kadin Indonesia Tegaskan Komitmen untuk Perekonomian Nasional Yang Tangguh, Sejahtera, Inklusif, dan Berkelanjutan

Tanggal 24 September memiliki makna yang istimewa bagi Kadin Indonesia. Setiap tanggal tersebut, Kadin Indonesia merayakan hari jadinya. Tahun 2023 ini, Kadin Indonesia merayakan HUT ke-55. Bertepatan dengan hari jadinya, Kadin Indonesia sebagai wadah utama dunia usaha sekaligus mitra strategis pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional melalui sejumlah inisiatif yang inklusif dan kolaboratif.

“Lebih dari setengah abad lalu, Kadin Indonesia lahir sebagai sebuah organisasi yang bertekad untuk menjadi tonggak utama dalam mengemban misi membangun perekonomian negeri ini melalui sektor usaha swasta. Di hari yang penuh makna dan sukacita ini, tepat di usia yang ke-55 tahun, Kadin Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk terus mendukung perekonomian nasional dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, di sela perayaan HUT ke-55 Kadin Indonesia di GBK, Senayan.

Sejumlah rangkaian kegiatan perayaan telah terselenggara, seperti Fun Walk yang diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta, termasuk anggota dewan direksi Kadin Indonesia dan masyarakat umum. Selain itu, Kadin Indonesia juga menghadirkan bazaar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan wujud dukungan terhadap UMKM. Gelaran perayaan dilengkapi dengan penampilan musik yang menghibur. Keseluruhan rangkaian perayaan ini mencerminkan semangat Kadin Indonesia yang terus mendorong kolaborasi yang inklusif dan rasa hangat kekeluargaan.





PENYERAHAN ROAD MAP INDONESIA EMAS 2045 DI IKN

Pada 2016 lalu, Presiden RI, Joko Widodo, meluncurkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu gambaran ideal dan capaian yang harus diraih Indonesia di usianya yang ke 100 tahun sejak kemerdekaan. Salah satu harapannya di usia 100 tahun, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pendapatan yang tinggi dan berkekuatan ekonomi ke-4 di dunia.

Dalam perjalanan menuju cita-cita ini, sektor usaha dan industri memegang peran penting dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia berkomitmen untuk mendukung mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Wujud konkret dari komitmen tersebut adalah Kadin Indonesia telah selesai menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Emas 2045. Sebagai perayaan HUT ke-55 Kadin Indonesia, Peta Jalan tersebut diserahkan secara langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 22 September 2023.



Peta jalan yang disusun secara inklusif dan kolaboratif ini diharapkan bisa menjadi panduan pembangunan untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan bahwa Peta Jalan Indonesia Emas 2045 merupakan persembahan Kadin Indonesia kepada bangsa. Melalui peta jalan ini, Kadin Indonesia berharap segala inisiatif yang mengarah pada rencana pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

(lanjutan di halaman 64)

Peta jalan ini dibuat agar segala upaya, program, serta inisiatif dapat mewujudkan pencapaian visi pembangunan ekonomi Indonesia Emas 2045. Peta jalan ini melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyusunannya dengan semangat gotong royong untuk masa depan sebagai negara maju, berisikan langkah-langkah konkret dengan metrik sebagai tolak ukur pembangunan,

kata Arsjad, di sela acara penyerahan yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Arsjad menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan cita-cita agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*). Indonesia juga diharapkan menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan pada produk domestik bruto (PDB) paritas daya beli (PPP) pada 2045.

"Seluruh potensi sumber daya yang ada, menjadikan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 semakin relevan bagi Indonesia dan para pemimpin bangsa ini kedepannya, untuk memberikan panduan dalam memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan," ungkap Arsjad.

Aspek Prioritas Visi Indonesia Emas 2045



Penyusunannya peta jalan ini dibuat berlandaskan pada empat aspek prioritas. Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan, dengan memajukan pelayanan kesehatan dan pangan. Kedua, aspek kesejahteraan, yang tidak hanya menyangkut produk domestik bruto (PDB) tetapi juga masyarakat dengan penghasilan yang tinggi dan kehidupan yang layak. Aspek ini bisa dipenuhi salah satunya melalui hilirisasi industri dan digitalisasi UMKM.

Ketiga, aspek inklusivitas yang menitikberatkan pada kesetaraan *gender* dan pemberdayaan populasi rentan, mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar. Keempat, aspek keberlanjutan, yaitu mencapai target dekarbonisasi dengan tetap memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan.

Arsjad menggarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa menerapkan nilai-nilai budaya dan bangsa, termasuk gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. "Karena itu, dalam penyusunan peta jalan ini, Kadin Indonesia melibatkan berbagai komponen bangsa, mulai dari asosiasi industri, serikat buruh, pelaku usaha, akademisi, organisasi keagamaan, hingga organisasi non-pemerintah (NGO)," tutup Arsjad.

(lanjutan di halaman 65)



Presiden RI, Joko Widodo, menerima secara langsung Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang diserahkan oleh Kadin Indonesia. "Peta Jalan yang diserahkan oleh Kadin Indonesia kepada Pemerintah Indonesia ini akan kami gunakan sebagai pedoman dalam perencanaan menuju Indonesia Emas 2045," ujar Joko Widodo.

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono, juga dengan bersemangat menyambut baik komitmen Kadin Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 pada penyerahan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 di IKN. "Kami menyambut baik inisiatif Kadin Indonesia yang menyerahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 di IKN. Ini merupakan simbol optimisme yang baik, terlebih dilakukan di IKN yang merupakan simbol visi Indonesia Emas 2045."

Kickoff Roadshow IKN di Balikpapan

Dalam upaya mendukung pembangunan Infrastruktur Kepulauan Indonesia (IKN), investasi dari pelaku usaha menjadi sangat penting. Pemerintah telah menyediakan fasilitas penanaman modal berupa insentif fiskal seperti Tax Holiday dan Super Tax Deduction. Selain itu, OIKN juga telah mengeluarkan kebijakan teknis untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. OIKN sangat menyambut baik minat pelaku usaha, terutama yang berasal dari dalam negeri, untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pelaku usaha tentang peluang investasi di IKN dan insentif yang dapat mereka peroleh.

Kadin Indonesia bersama dengan OIKN telah melaksanakan konsultasi publik dengan para pelaku usaha di Balikpapan pada 16 Agustus 2023. Di tahun 2023 ini, dalam beberapa bulan ke depan, akan dilaksanakan roadshow serupa di beberapa kota lain di Indonesia.



Peserta dalam Kegiatan Konsultasi Publik tentang Peluang Penanaman Modal, Insentif Penanaman Modal, dan Kemudahan Berusaha di IKN adalah anggota dan pengurus Kadin Daerah, anggota dan pengurus Kadin Kota/Kabupaten, serta para pengusaha lokal di setiap lokasi pelaksanaan. Jumlah peserta yang ditargetkan untuk masing-masing lokasi pelaksanaan adalah sebanyak 200 orang.



Dapatkan Buku
Roadmap Indonesia Emas 2045
selengkapnya di sini:
kadin.id/program/indonesia-emas



Untuk detail lebih lanjut
mengenai berita IKN
dapat diunduh di sini:
tinyurl.com/BeritaIKN



PENGUMUMAN PENTING

Siaran Pers Kadin Indonesia

Informasi Resmi dari Kadin Indonesia Tentang Keputusan Pribadi Arsjad Rasjid

Jakarta, 27 September 2023 - Kadin Indonesia telah menerima informasi resmi mengenai keputusan independen dan pribadi yang diambil oleh Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) untuk menerima posisi sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk salah satu Bakal Calon Presiden (Bacapres).

Keputusan Arsjad Rasjid merupakan keputusan independen dan tidak memiliki hubungan dengan posisi atau pandangan Kadin Indonesia dalam dunia politik. Kadin Indonesia dengan tegas berkomitmen untuk tetap netral dan fokus pada kegiatan organisasi yang sudah disusun dengan baik. "Keputusan ini saya ambil dengan pertimbangan pribadi dan tidak melibatkan urusan organisasi saya di Kadin Indonesia," tegas Arsjad Rasjid.

Dengan bergabungnya Arsjad menjadi Ketua TPN untuk salah satu Bacapres, dirinya akan berhalangan sementara efektif Rabu, 27 September 2023, dan pelaksanaan tanggung jawab operasional harian akan diserahkan kepada Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Pelaksana Tugas Harian Kadin Indonesia. "Dengan keputusan ini, saya akan berhalangan sementara sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia," ungkap Arsjad.

Yukki Nugrahawan Hanafi yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian Kadin Indonesia, menghormati keputusan yang telah diambil oleh Arsjad Rasjid.

"Kadin Indonesia menghormati keputusan beliau yang berhalangan sementara serta taat pada peraturan yang berlaku di Kadin Indonesia. Kadin Indonesia harus bebas dari konflik kepentingan," ujar Yukki Nugrahawan Hanafi.

Kadin Indonesia akan memastikan dan melanjutkan peranannya dalam mengemban amanah dari anggotanya dan seluruh masyarakat Indonesia, mempromosikan kebijakan dan inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang berdasarkan nilai gotong royong demi Indonesia Maju.

MANFAAT

Keanggotaan **Kadin**

Nikmati ragam keuntungan dan manfaat dengan menjadi bagian dari **keanggotaan Kadin Indonesia**



Update terhadap
Perkembangan Ekonomi
dan **Bisnis**



Net Zero



Dukungan **Advokasi**



Kemudahan **Pembuatan**
Surat Keterangan



Scaling up skill/
Kemampuan Wirausaha
dan Pekerja



Akses terhadap **Market**



Tumbuhkan Bisnis melalui
Network dan **Kolaborasi**



Akses terhadap
Transformasi Digital



Kesempatan **Promosi**



Dukungan dalam
Penerapan TKDN



Terlibat dalam
Penyusunan Kebijakan
Industrial



Potongan Harga

CARA PENDAFTARAN

Anggota Kadin



Scan QR Code atau
kunjungi **anggota.kadin.id**

1



Klik **"Daftar Anggota"**, lalu pilih jenis keanggotaan

2



Membuat akun dengan mendaftarkan **email** dan **NIK**

3



Menerima notifikasi pendaftaran akun dari **info.anggota@kadin.id**

4



Masuk dengan akun yang didaftarkan

5



Lengkapi formulir dengan data yang diperlukan

Persyaratan yang dibutuhkan:

- ✓ Email Penanggung Jawab
- ✓ NIB Perusahaan
- ✓ AKTA Perusahaan
- ✓ NPWP Perusahaan
- ✓ KTP Direksi
- ✓ Foto Pass Direksi
- ✓ No HP Penanggung Jawab

6



Menerima notifikasi dan unduh invoice pembayaran

7



Melakukan pembayaran ke rekening/ virtual account yang tertera di invoice

8



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**

9



Download **KTA-B**, Anda telah resmi menjadi anggota Kadin

CARA MEMPERPANJANG KEANGGOTAAN KADIN

Hotline Keanggotaan
0813 8862 8081 | 0813 9830 2790



Kunjungi **anggota.kadin.id**



Masukan Email dan kata sandi, lalu klik **"Masuk"**



Klik menu **"KTA"**, lalu klik menu **"Perpanjang KTA"**



Menerima notifikasi perpanjangan keanggotaan dan invoice dari **info.anggota@kadin.id**



Melakukan pembayaran ke rekening/virtual account yang tertera di invoice



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



Download **KTA-B**, Anda telah memperpanjang keanggotaan Kadin

FITUR TERBARU

Website **Kadin.id**



Forum Anggota Kadin

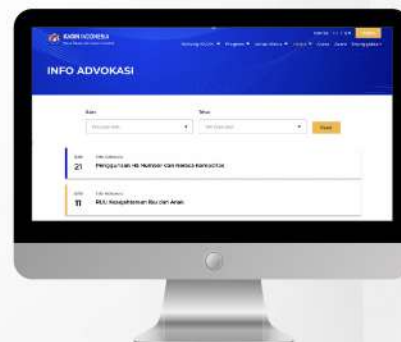
Dibuat sebagai tempat **berbagi informasi** seputar bisnis, *networking*, dan diskusi interaktif seputar perkembangan dunia usaha. Forum Anggota Kadin dikelola oleh Sekretariat Kadin Indonesia sebagai administrator.

Layanan Kadin



Halaman-halaman yang menonjolkan **layanan sekretariat** dan **manfaat keanggotaan**

Info Advokasi Kadin



Tempat untuk menghimpun informasi mengenai **perkembangan advokasi terkini** yang dilakukan oleh Kadin

BERITA TERKINI | 29 SEPTEMBER 2023

Indonesia Secara Resmi Larang Transaksi E-Commerce di Media Sosial

SUMBER: HUKUMONLINE.COM

Belakangan ini, kekhawatiran di tengah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ("UMKM") serta masyarakat luas di penjuru negeri semakin meningkat mengenai platform media sosial ("Media Sosial") yang memfasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik ("PMSE"). Kekhawatiran ini berpusat pada kenyataan bahwa pedagang konvensional dan UMKM terkena dampak negatif dari perdagangan online dan mengalami kerugian besar.^[1] Terkait hal tersebut, Menteri Perdagangan ("Mendag") mengamini kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa Media Sosial yang sekaligus melakukan kegiatan usaha PMSE berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar dengan menggunakan algoritma pengguna Media Sosial, sehingga dapat mengatur iklan produk yang sesuai dengan preferensi pengguna Media Sosial.^[2]

Mengingat situasi yang sangat merugikan, dan sebagai upaya untuk lebih memberdayakan UMKM dalam negeri, Mendag menerbitkan Peraturan No. 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik ("Permendag 31/2023"), yang telah berlaku sejak 26 September 2023.^[3] Dengan berlakunya Permendag 31/2023, maka peraturan sebelumnya yang mengatur persyaratan PMSE, yakni Peraturan Mendag No. 50 tahun 2020 ("Permendag 50/2020"), dengan judul yang sama, dihapus dan diganti.^[4]

Pada intinya, Permendag 31/2023 tetap mempertahankan ruang lingkup pelaku usaha dalam dan luar negeri yang semula diatur dalam Permendag 50/2020, yang terdiri dari: 1) Pedagang; 2) Penyelenggara PMSE ("PPMSE"); dan 3) Penyelenggara sarana perantara (PSP).^[5] Namun, yang baru diatur dalam Permendag 31/2023 adalah penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai model bisnis bagi PPMSE di dalam dan luar negeri, sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:^[6]

Model Bisnis PPMSE	Keterangan	Contoh Platform
Retail online	Pedagang yang melakukan PMSE melalui situs web atau aplikasi yang dibuat, dikelola, dan/atau dimiliki sendiri	Foodhall, Klik Indomaret, Gramedia Digital, dan Lottemart Online ^[7]
Lokapasar (marketplace)	Penyedia yang memfasilitasi pedagang dalam melakukan transaksi dan penawaran barang dan/atau jasa melalui situs web atau aplikasi yang dibuat secara komersial	Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada ^[8]
Iklan baris online	Situs web atau aplikasi komersial untuk mempertemukan penjual dan pembeli yang transaksinya terjadi di luar situs web atau aplikasi tersebut	OLX, Craigslist, Mobil123, dan JobStreet ^[9]

(lanjutan di halaman 71)

[1] CNN Indonesia, "Zulhas Resmi Teken Aturan Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi", yang diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230926166038-92-1004021/zulhas-resmi-teken-aturan-larang-tiktok-shop-cs-jualan-dan-transaksi> on 27 September 2023. | [2] Ibid. | [3] Bagian "Menimbang" dan Pasal 67, Permendag 31/2023. | [4] Pasal 66, Permendag 31/2023 dan Permendag 50/2020 telah diulas dalam ILB No. 3882. | [5] Bandingkan Pasal 2, Permendag 50/2020 dengan Pasal 2 (1 - 2), Permendag 31/2023. | [6] Pasal 1 (12 - 17) dan 2 (3), Permendag 31/2023. | [7] Crewdible, "Apa itu Retail Online? Ini Tujuan, Contoh, dan Prosesnya", yang diakses di: <https://crewdible.com/edukasi/topik/mulai-bisnis-online/retail-online-adalah-pada-29-september-2023>. | [8] Crewdible, "Apa itu Marketplace? Pengertian, Jenis, Manfaat & Contohnya", yang diakses di: <https://crewdible.com/edukasi/topik/marketplace/> marketplace-adalah-pada-29-september-2023. | [9] Tirto, "Iklan Baris Online Semakin Manis", yang diakses di: <https://tirto.id/iklan-baris-online-semakin-manis-czc3> pada 29 September 2023.

Model Bisnis PPMSE	Keterangan	Contoh Platform
Platform pembanding harga	Situs web atau aplikasi komersial yang menampilkan perbandingan antara barang dan/atau jasa yang ditawarkan di situs web atau aplikasi lain	Telunjuk, Pricebook, PriceArea, dan PricePrice ^[10]
Daily deals	Situs web atau aplikasi komersial yang menawarkan penjualan berbasis kupon, diskon, dan/atau fasilitas lainnya sebagai sarana pembayaran kepada konsumen yang membeli barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain	Bucketlist, Dealgoing, Grivy, dan Groupon ^[11]
Social commerce	Pedagang yang melakukan PMSE melalui situs web atau aplikasi yang dibuat, dikelola, dan/atau dimiliki sendiri	TikTok Shop, Instagram Shopping, dan Facebook Marketplace ^[12]

Mengingat peraturan mengenai Media Sosial dan PMSE ini sangat dinantikan, Indonesian Legal Brief ("ILB") edisi ini akan memberikan ringkasan atas ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam Permendag 31/2023, khususnya yang berkaitan dengan perihal berikut:

1. *Social Commerce, Marketplace, dan Retail Online*: Larangan yang Berlaku;
2. Pencegahan Praktik Bisnis Tidak Sehat dan Manipulasi Harga; dan
3. PMSE Lintas Negara: Harga Minimum Barang Impor.

Social Commerce, Marketplace, dan Retail Online: Larangan yang Berlaku

Pada intinya Permendag 31/2023 menetapkan bahwa dalam melakukan PMSE, pelaku usaha wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di berbagai bidang, antara lain:^[13]

Perizinan Berusaha	bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang dan/atau jasa yang diwajibkan	Barang dan/atau jasa yang dilarang dan/atau dibatasi perdagangannya	Distribusi barang	Perpajakan
--------------------	--	---	-------------------	------------

Terkait kegiatan usaha PPMSE berupa *social commerce* dan *marketplace*, Permendag 31/2023 mengatur beberapa larangan yang berlaku untuk model PPMSE tersebut, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:^[14]

(lanjutan di halaman 72)

[10] Kumparan, "4 Situs Terbaik Pembandingan Harga Setiap E-commerce", yang diakses di: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/4-situs-terbaik-pembandingan-harga-setiap-e-commerce-1tDm3v0Ry6k/full> pada 29 September 2023.
[11] Midtrans, "5 Website Daily Deals Terbaik di Indonesia", yang diakses di: <https://midtrans.com/id/blog/5-website-daily-deals-terbaik-di-indonesia> pada 29 September 2023. [12] GNFI, "Social Commerce dan Larangan Pemerintah Imbas Harga Tak Masuk Akal", yang diakses di: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/09/26/social-commerce-dan-larangan-pemerintah-imbas-harga-tak-masuk-akal?utm_source=google-news&utm_medium=aggregator&utm_campaign=baca-gnfi pada 29 September 2023. [13] Pasal 21 (1), Permendag 31/2023. [14] Pasal 21 (2 - 3), Permendag 31/2023.

Kegiatan yang Dilarang	Bentuk PPMSE	
	Social Commerce	Marketplaces
Bertindak sebagai produsen sesuai peraturan perundang-undangan mengenai distribusi barang	✓	✓
Memfasilitasi transaksi pembayaran melalui sistem elektronik ("Sistem")	✓	

Akibat larangan tersebut, setiap Media Sosial yang termasuk dalam kategori *social commerce* kini hanya dapat memfasilitasi promosi barang dan/atau jasa.^[15] Karena *social commerce* dilarang merangkap sebagai *marketplace*, maka Media Sosial yang ingin melakukan transaksi PMSE harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai PMSE *marketplace*, dengan membuat *marketplace* yang terpisah dari platform *social commerce*.^[16]

Selain itu, Permendag 31/2023 juga melarang PPMSE menampilkan iklan elektronik di Sistemnya dengan cara apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan.^[17] Jika ditemukan iklan elektronik yang melanggar, maka Permendag 31/2023 mengamanatkan PPMSE untuk memutus akses terhadap konten iklan tersebut.^[18] Selanjutnya, apabila PPMSE dengan model bisnis selain *retail online* telah memutus akses terhadap konten iklan elektronik milik pelaku usaha yang sama sebanyak lebih dari tiga kali, maka PPMSE harus memutus akses terhadap akun pelaku tersebut.^[19]

Jika tidak mematuhi larangan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, sanksi administratif yang berlaku mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.^[20] Sebagai perbandingan, larangan terhadap *social commerce*, *marketplace*, dan *retail online* yang dijelaskan di atas tidak diatur sebelumnya dalam Permendag 50/2020.

Pencegahan Praktik Bisnis Tidak Sehat dan Manipulasi Harga

Baru ditetapkan dalam Permendag 31/2023, dalam melakukan PMSE, PPMSE kini wajib berperan aktif untuk:^[21]

1. Memberikan kesempatan berusaha yang sama kepada seluruh pedagang; dan
2. Menjaga harga barang dan/atau jasa bebas dari manipulasi harga baik langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, Permendag 31/2023 juga mewajibkan PPMSE untuk mengawasi, mencegah, dan menaggulangi praktik usaha yang tidak sehat dan/atau manipulasi harga dengan menetapkan standar operasional prosedur.^[22] Terkait hal tersebut, upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan memastikan:^[23]

(lanjutan di halaman 73)

[15] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pemerintah Revisi Permendag 50/2020, Medsos Hanya Fasilitasi Promosi Bukan Transaksi", yang diakses di: <https://setkab.go.id/pemerintah-revisi-permendag-50-2020-medsos-hanya-fasilitasi-promosi-bukan-transaksi/> pada 27 September 2023. | [16] CNN Indonesia, "Poin-poin Permendag soal Larangan Social Ecommerce Seperti TikTok Shop", yang diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230927172615-92-1004544/poin-poin-permendag-soal-larangan-social-e-commerce-seperti-tiktok-shop> pada 29 September 2023. | [17] Pasal 29 (1), Permendag 31/2023. | [18] Pasal 29 (2), Permendag 31/2023. | [19] Pasal 29 (3), Permendag 31/2023. | [20] Pasal 50 dan 58, Permendag 31/2023. | [21] Pasal 13 (1), Permendag 31/2023. | [22] Pasal 13 (2), Permendag 31/2023. | [23] Pasal 13 (3), Permendag 31/2023.

1. Tidak adanya keterhubungan atau interkoneksi antara Sistem yang digunakan untuk PMSE dengan Sistem non-PMSE lainnya; dan
2. Tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data milik pengguna PPMSE yang dapat
3. disalahgunakan untuk kepentingan PPMSE dan/atau perusahaan yang berafiliasi dengan Sistemnya.

Permendag 31/2023 mengamanatkan PPMSE untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam waktu tiga hari kerja sejak ditemukannya dugaan praktik usaha tidak sehat dan/atau manipulasi harga.^[24] Perlu dicatat, jika tidak memenuhi tindakan yang dijelaskan di atas, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.^[25]

PMSE Lintas Negara: Harga Minimum Barang Impor

Permendag 31/2023 menegaskan bahwa kegiatan PMSE lintas negara harus sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang berlaku di sektor impor dan ekspor.^[26] Baru diperkenalkan dalam Permendag 31/2023, PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE lintas negara wajib menerapkan harga minimum barang untuk pedagang yang menjual barang jadi yang diimpor dalam Sistemnya.^[27]

Terkait dengan harga minimum tersebut, Permendag 31/2023 menetapkan harga minimum sebesar Freight on Board (FOB) US\$ 100 per unit barang. Jika barang diberitahukan dalam mata uang lain, maka harus dikonversi terlebih dahulu menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.^[28] Akan tetapi, barang dengan harga di bawah harga minimum masih dapat menjadi objek PMSE lintas negara setelah ditetapkan oleh Mendag.^[29] Sebagai perbandingan, harga minimum untuk PMSE lintas negara yang disebutkan di atas tidak diatur sebelumnya dalam Permendag 50/2020. (KS)

^[24] Pasal 13 (4), Permendag 31/2023. | ^[25] Pasal 50 dan 58, Permendag 31/2023. | ^[26] Pasal 20, Permendag 31/2023. | ^[27] Pasal 19 (1), Permendag 31/2023. | ^[28] Pasal 19 (2 - 3), Permendag 31/2023. | ^[29] Pasal 19 (4), Permendag 31/2023.

ADVOKASI KEBIJAKAN

Terkait Regulasi Social Commerce, Kadin Indonesia Lakukan Audiensi

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dianggap mengancam dan merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 yang mengatur tentang perdagangan elektronik, pemerintah berupaya untuk menciptakan regulasi yang lebih tepat guna dan efektif dalam mengatur perdagangan elektronik, khususnya dalam hal TikTok Shop.

(lanjutan di halaman 74)

Adanya regulasi yang lebih ketat untuk barang-barang impor melalui *e-commerce* adalah upaya untuk menyamakan persyaratan dengan barang impor yang masuk melalui jalur perdagangan konvensional. Selain itu, revisi Permendag 50 tahun 2020 menjadi Permendag 50 tahun 2023 ini juga bertujuan untuk mencegah barang-barang impor ilegal masuk ke dalam negeri.

Menyikapi perubahan ini, Kadin Indonesia senantiasa berupaya memastikan agar aspirasi para pelaku industri dapat diakomodasi pada Permendag baru. Oleh karena itu, pada 15 September 2023, Bidang Kewirausahaan Kadin Indonesia melakukan audiensi di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM).



Pada audiensi ini, Ketua Komite Tugas Khusus UMKM Ekspor Kadin Indonesia, Nita Kartikasari dan Ketua Komite Tugas Khusus Advokasi Kebijakan Kadin Indonesia, Chrisma Albandjar, menyampaikan pandangan terkait Kebijakan *Social Commerce* dalam rencana revisi Permendag 50 tahun 2020 yang mencakup ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Juan P. Adoe, menyampaikan posisi Kadin Indonesia terkait dengan permasalahan berkaitan dengan perkembangan model bisnis *social commerce* yang berdampak negatif pada UMKM dan sektor perdagangan di Indonesia, "Kadin Indonesia tidak melarang adanya model bisnis *social commerce* di Indonesia karena dapat memberikan peluang ekonomi yang luas melalui inovasi dan teknologi. Namun, kami merekomendasikan bahwa model bisnis *social commerce* harus diatur sesuai dengan peraturan *e-commerce* yang berlaku, produk yang dijual di platform *social commerce* harus memiliki izin, sistem interoperabilitas dan interkoneksi harus diterapkan, dan praktik kanibalisme yang merugikan UMKM lokal harus dihindari."

Kadin Indonesia mengusulkan agar perusahaan *social commerce* mendukung UMKM masuk pasar internasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan perdagangan produk UMKM internasional dan lokal, serta berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan penelitian di Indonesia.

Selain itu, hasil dari diskusi ini adalah pembentukan *task force* yang bertugas untuk merumuskan aspirasi dan masukan dari industri. Kadin Indonesia berharap agar Kemenkop UMKM dapat memfasilitasi proses ini dengan mendorong Kementerian Perdagangan untuk memberikan tenggat waktu yang memadai bagi pelaku industri *social commerce* untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan regulasi.

BERITA TERKINI | 2 OKTOBER 2023

Kewajiban Pengguna Bursa Karbon Diperkenalkan: Ketidakpatuhan akan Dikenakan Sanksi

SUMBER: HUKUMONLINE.COM

PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sebagai pihak yang telah mendapatkan izin usaha untuk beroperasi sebagai Penyelenggara Perdagangan Karbon ("Penyelenggara"), telah memperkenalkan berbagai kerangka hukum yang secara khusus membahas pelaksanaan perdagangan karbon, termasuk Keputusan Anggota Direksi BEI No. KEP-00297/BEI/09-2023 ("KepBEI 297/2023") tentang Pengaturan Pengguna Jasa Bursa Karbon ("Pengguna Bursa"), yang telah berlaku sejak 20 September 2023.

KepBEI 297/2023 menetapkan berbagai ketentuan yang membahas Pengguna Bursa, sebagaimana dirinci dalam Lampiran KepBEI 297/2023, yang secara khusus mencantumkan pengaturan yang terkait dengan bidang-bidang berikut, antara lain: 1) Pengguna Bursa; 2) Persyaratan dan prosedur Pengguna Bursa; 3) Pendaftaran user Pengguna Bursa; 4) Hak dan kewajiban Pengguna Bursa; 5) Sanksi; 6) Pemeriksaan Pengguna Bursa; 9) Pencabutan surat persetujuan Pengguna Bursa; dan 10) Biaya.

Karena luasnya cakupan pengaturan yang terdapat dalam KepBEI 297/2023, edisi Indonesian Legal Brief ("ILB") kali ini akan membatasi pembahasannya pada topik-topik terkait Pengguna Bursa berikut:

1. Klasifikasi, persyaratan dan prosedur; dan
2. Kewajiban dan sanksi.

Klasifikasi, Persyaratan dan Prosedur

Pengguna Bursa dapat terdiri dari badan hukum Indonesia/asing, khususnya:^[1]

1. Pelaku usaha pedagang emisi;
2. Pelaku usaha non-pedagang emisi;
3. Pemilik proyek; dan
4. Pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

KepBEI 297/2023 berisi ketentuan tertentu yang secara khusus membahas pihak-pihak di atas, sebagaimana juga diatur dalam Keputusan Direksi BEI No. KEP-00296/BEI/09-2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon, yang secara khusus dibahas dalam ILB edisi berikut: "BEI Terbitkan Mekanisme Perdagangan Karbon melalui PBK: Empat Segmentasi Pasar Diperkenalkan."

Baik badan hukum Indonesia/asing sebagai Pengguna harus memenuhi berbagai persyaratan umum dan khusus, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:^[2]

(lanjutan di halaman 76)

[1] Bagian II dan III, Lampiran, KepBEI 297/2023. [2] Bagian IV, Lampiran, KepBEI 297/2023.

Persyaratan	Badan Hukum Indonesia	Badan Hukum Asing
Harus mempekerjakan petugas yang akan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas apa pun yang disediakan oleh Penyelenggara.	✓	✓
Harus mengikuti pelatihan yang secara khusus membahas bursa karbon, sebagaimana diselenggarakan oleh Penyelenggara.	✓	✓
Harus memiliki email dan menggunakan nama domain perusahaan yang relevan.	✓	✓
Minimal dua perwakilan Pengguna Bursa harus mengikuti sesi pelatihan.	✓	✓
Harus membayar biaya pendaftaran Pengguna Bursa yang relevan.	✓	✓
Harus memiliki rekening bank yang terhubung dengan sistem BI-FAST dan BI-RTGS.	✓	✓
Harus memiliki laporan keuangan minimal satu tahun buku terakhir ("Laporan Keuangan").	✓	✓
Harus memiliki anggaran dasar perseroan yang telah disahkan, diberitahukan atau disetujui oleh pihak berwenang terkait.	✓	
Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).	✓	
Harus memiliki nomor identitas (<i>legal entity identifier</i>) yang telah terdaftar di Regulatory Oversight Committee (ROC).		✓

Selain itu, tabel berikut mencantumkan prosedur keseluruhan yang harus diikuti untuk menjadi Pengguna Bursa:^[3]

Langkah 1: Pengajuan Permohonan

Calon Pengguna Bursa harus mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara menggunakan Formulir 1 (yang tercantum dalam Lampiran KepBEI 297/2023), bersama dengan dokumen yang diperlukan berikut baik dalam bentuk cetak maupun elektronik:

1. Sertifikat pelatihan bursa karbon, yang dikeluarkan oleh Penyelenggara;
2. Bukti pembayaran yang berkaitan dengan biaya pendaftaran; dan
3. Laporan Keuangan.

Badan hukum Indonesia/asing juga harus menyerahkan dokumen persyaratan khusus yang diuraikan dalam tabel di atas.

(lanjutan di halaman 77)

[3] Bagian V, Lampiran, KepBEI 297/2023.

Langkah 2:
Penelaahan Dokumen yang Diserahkan dan Penetapan oleh Penyelenggara

Penyelenggara akan melakukan penelaahan dokumen yang diserahkan dalam waktu lima hari setelah informasi dan dokumen yang diperlukan telah diserahkan sebagaimana mestinya.

Penyelenggara akan menyampaikan konfirmasi kepada calon Pengguna Bursa dalam waktu lima hari sejak tahap peninjauan dianggap selesai. Konfirmasi tersebut dapat mengambil bentuk berikut:

1.

Pernyataan yang menegaskan bahwa calon Pengguna Bursa telah memenuhi persyaratan (akan diberikan surat persetujuan); atau
2.

Pernyataan yang menegaskan bahwa calon Pengguna Bursa belum memenuhi persyaratan (akan diterbitkan surat penolakan). Perlu dicatat bahwa setiap pihak yang ditolak dapat mengajukan kembali permohonan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan KepBEI 297/2023.

Kewajiban dan Sanksi

Dalam hal pelaksanaan perdagangan bursa karbon, Pengguna Bursa diwajibkan untuk mematuhi berbagai kewajiban. Namun, sanksi administratif tertentu dapat dikenakan kepada Pengguna Bursa sehubungan dengan tindakan ketidakpatuhan. Kewajiban Pengguna Bursa dirangkum dalam tabel di bawah ini:^[4]

Harus bertanggung jawab penuh atas penggunaan segala sarana yang disediakan oleh Penyelenggara, termasuk untuk penggunaan <i>user-id</i> dan <i>password</i> yang diberikan	Harus menjaga kerahasiaan <i>user-id</i> dan <i>password</i> yang diberikan, dilarang diberikan ke pihak lain	Harus mematuhi ketentuan, persyaratan dan tata cara yang berkaitan dengan penggunaan sarana, sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara
Harus membayar biaya transaksi yang relevan	Harus memikul tanggung jawab Pengguna Bursa lainnya sehubungan dengan kewajiban yang timbul dari setiap transaksi dan penyelesaian	Harus menyampaikan laporan insidental dalam waktu paling lambat tujuh hari Penyelenggara sejak perubahan yang dilakukan pada jenis informasi tertentu (misalnya izin usaha, nama Pengguna Bursa, informasi yang berkaitan dengan Pengguna Bursa, anggota dasar perseroan, dll.)

Dalam hal pelanggaran kewajiban yang tercantum di atas, Penyelenggara berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu, yang akan dirangkum dalam pengumuman tertulis. Sanksi tersebut dirinci sebagai berikut:^[5]

1.

Teguran tertulis;
2.

Peringatan tertulis;
3.

Denda paling banyak Rp500 juta;
4.

Pembekuan Pengguna Bursa;
5.

Pencabutan surat persetujuan Pengguna Bursa.

[4]

Bagian VII, Lampiran, KepBEI 297/2023.

[5]

Bagian VIII, Lampiran, KepBEI 297/2023.

Acara Mendatang

PAMERAN

Trade Expo Indonesia (TEI) 2023

18-22 Oktober 2023 | ICE, BSD Tangerang



Info lebih lanjut:
www.tradexpoindonesia.com

ASEAN ASEAN POLICY BANK INDONESIA BANK INDONESIA KNEKES KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMAHANEAN HEI 2023 HALAL EXPO INDONESIA ISEF 10th EDITION INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL Baiturrahman

ONE DECADE SPREAD KINDNESS

with
ISEF 10th EDITION

Indonesia Sharia Economic Festival
in collaboration with
HEI (Halal Expo Indonesia)

✦ 25th – 29th October 2023 ✦
at Jakarta Convention Center

SERIES OF EVENTS

Halal Product Showcase • Indonesia International Modest Fashion Festival (INZMF) • Indonesia International Halal Chef Competition (INZHCC) • Conference + Talkshow • Tablig • Competitions • Fun Walk • Kids Activities • Sharia Financial Services • Halal Certification Services • Rupiah Exchange Services

**FREE
PUBLIC ENTRY**

#ISEF2023 #BaiturHalalinYou #DigitalHalalSyariah

Instagram: @isef14, Facebook: idn.isef, Twitter: @isefIndonesia, Website: www.isef.co.id

PAMERAN

Indonesia Sharia Economic Festival

25-29 Oktober 2023
Jakarta Convention Center



Info lebih lanjut:
isef.co.id/id/beranda/



PAMERAN

Medan Investment Forum

27 Oktober 2023 | JW Marriott Medan



Link Pendaftaran:
bit.ly/DAFTARUSAHAPOENSIAL



FORUM

61st Annual Session of the Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)

12 Oktober 2023 | Sheraton Bali Kuta Resort



Link Pendaftaran:
bit.ly/YouthForumAALCO61th



ASEAN-BAC ROADSHOW

ASEAN-BAC Indonesia 2023 Side Event: Regional Connectivity: A Pathway to Inclusive Growth

23 Oktober 2023 | JW Marriott Hotel Medan

INVITATION ONLY



Sekilas Tentang Kadin for Naker

Kadin for Naker hadir dalam bentuk **platform digital** untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri sekaligus menjadi platform link & match antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Kadin for Naker merupakan **program pengembangan kapasitas** inisiatif Kadin Indonesia bersama dengan Serikat Buruh di Indonesia dan didukung oleh Pijar Foundation.

Manfaat Kadin for Naker untuk Pekerja

-  Materi pembelajaran yang dapat diakses **kapan saja**
-  Materi yang disesuaikan dengan **kebutuhan industri**
-  Lowongan kerja dari perusahaan yang **terverifikasi**

Manfaat Kadin for Naker untuk Perusahaan

-  Sarana **peningkatan kualitas SDM** bagi perusahaan
-  **Keterampilan pekerja** yang terverifikasi
-  Peningkatan kapasitas pekerja untuk kinerja yang **lebih optimal**
-  Pencarian tenaga kerja berdasarkan **kompetensi** yang dicari

Kategori Kelas di Kadin for Naker

Mencari Pekerjaan

Pengembangan Diri

Mencari Pendapatan Tambahan

Program Komputer

Bahasa

Keterampilan Industri Spesifik

Tata Cara Mendaftar Kadin for Naker



WIKI WIRAUSAHA

Platform digital yang berfungsi sebagai wadah bagi UMKM, Perusahaan, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung UMKM Indonesia untuk naik kelas

Akses pasar

Akses keuangan

Pelatihan

Kemitraan inklusif

Direktori UMKM



Banyak sekali ilmu dan skill yang saya dapatkan setelah mengikuti program ini. Materinya mudah untuk dipahami, sehingga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bahkan di bisnis yang saya geluti selama ini.

Achmad Muzamil

Pengusaha asal Wonosobo

Mari bergabung dan tampilkan profil perusahaan anda agar terhubung dengan berbagai calon Mitra Perusahaan atau UMKM lainnya.



wikiwirausaha.id

Daftar ke:

wikiwirausaha@kadin.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950

“Menuju Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan”

NZH adalah sebuah inisiatif dari dunia usaha untuk mencapai *Net Zero Emission* di Indonesia. Bersama Kadin, mari wujudkan komitmen perusahaan anda menuju *Net Zero*, melalui:

Science Based Emission

Emission Reduction

Climate Mitigation

Climate Adaptation

Daftar sekarang juga ke

secretariat@netzerohub.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



Netzerohub.id

EKSPOR BARANG ANDA KE SELURUH DUNIA MELALUI TRADE

TRADE adalah platform Sentra Layanan Dokumen Elektronik KADIN Indonesia yang membantu pembuatan dokumen ekspor seperti *COO*, *Certificate of Export Goods*, *Certificate of Free Sale*, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

Tahapan-tahapan untuk membuat dokumen ekspor:



Klik **Masuk** atau **Daftar** untuk masuk maupun mendaftar akun.

Masukkan alamat email dan password. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan klik **Daftar**.



Pilih **Document Registration** untuk melengkapi data-data mengenai perusahaan.



Lengkapi data-data dan unggah dokumennya, lalu klik **Save Changes**.



Pilih **Create COO** lalu pilih form yang sesuai kebutuhan dengan klik **Create**



Isi form dengan melengkapi data Itinerary dan Goods Item dan unggah dokumennya.



Setelah selesai mengisi form, tunggu beberapa saat hingga status berubah dari **Waiting for Approval** menjadi **Waiting for Payment**. Lalu buka menu **Transaction**, pilih **Pending Transaction**, lalu klik **Pay**. Kemudian lakukan pembayarannya menggunakan **virtual account** yang tertera.



Setelah pembayaran dilunaskan, COO **Siap Dicetak** dan digunakan.

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi Help desk:

☎ +62 882-1975-0620 (LEO) ☎ +62 882-9208-4913 (ALDI)



SCAN QR
ATAU KUNJUNGI
edocs.kadin.id/



KADIN INDONESIA



Informasi lanjutan terkait **pasar internasional** dapat ditemukan di sini:

bsd-kadin.id

WIKI WIRSAHAHA



Temukan informasi menarik bagi **pengembangan bisnis UMKM** di sini:

Wikiwirausaha.id



Temukan layanan **pengurusan dokumen dagang** di sini:

edocs.kadin.id



Ikut bergabung dalam ekosistem **bisnis berkelanjutan** di sini:

Netzerohub.id



Kembangkan kapasitas dan kesempatan meningkatkan jenjang karir di sini:

kadinforaker.id

Disusun oleh
Humas Sekretariat Kadin Indonesia

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484